

**TINJAUAN HUKUM ISLAM
TERHADAP PROSEDUR PENGAJUAN SERTIFIKASI HALAL
PADA PRODUK MAKANAN OLAHAN KERIPIK PISANG
(Studi pada Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika)
Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) Provinsi Lampung**



**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dan Memenuhi Syarat-Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Dalam Ilmu Syari'ah**

Oleh

RICKY PRABOWO

NPM : 1421030134

Program Studi : Muamalah

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
1439H / 2018M**

TINJAUAN HUKUM ISLAM
TERHADAP PROSEDUR PENGAJUAN SERTIFIKASI HALAL
PADA PRODUK MAKANAN OLAHAN KERIPIK PISANG
(Studi pada Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika)
Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) Provinsi Lampung

Skripsi
Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dan Memenuhi Syarat-Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Dalam Ilmu Syari'ah

Oleh

RICKY PRABOWO

NPM : 1421030134

Program Studi : Mu'amalah

Pembimbing I : Dr. H. Khairuddin, M.H

Pembimbing II : Eti Karini, S.H., M.Hum

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERIRADEN INTAN LAMPUNG
1439H/ 2018M

ABSTRAK

Tinjauan Hukum Islam Terhadap Prosedur Pengajuan Sertifikasi Halal Pada Produk Makanan Olahan Keripik Pisang (Studi Pada LPPOM MUI Provinsi Lampung)

Oleh

Ricky Prabowo

MUI melalui LPPOM dan Komisi Fatwa berupaya untuk memberikan jaminan produk halal melalui instrumen sertifikat dan labeliasi halal. Sedikit dari pelaku usaha tersebut terkadang ada yang tidak memperpanjang sertifikasi halal dengan alasan sudah terdaftar ada pula yang tidak mendaftar sama sekali dengan alasan terkendala biaya dan lain sebagainya. Dalam pemeriksaan yang dilakukan auditor eksternal, pelaku usaha dikhawatirkan tidak jujur tentang bahan yang bertujuan untuk keuntungan pribadi. Laporan berkala setiap 6 bulan sekali kepada LPPOM MUI tidak dapat menutup kemungkinan dengan ketidaksesuaian bahan dan lainnya. Kurangnya audit eksternal yang memeriksa 6 bulan sekali dari pihak LPPOM dimanfaatkan pelaku usaha untuk tidak memperpanjang sertifikasi halal. Hal ini sangat disayangkan tentang kesadaran pelaku usaha dalam menjalankan prosedur pengajuan sertifikasi halal yang telah dilakukan sebelumnya.

Dari latar belakang tersebut dapat dirumuskan sebagai berikut *pertama*, bagaimana prosedur pengajuan sertifikasi halal di LPPOM MUI provinsi lampung *kedua*, bagaimana tinjauan hukum islam terhadap legalitas sertifikasi halal. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui permasalahan di bidang makanan olahan terkait sertifikasi halal di makanan olahan keripik pisang di Kota Bandar Lampung. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan, jenis penelitian adalah kualitatif dengan tehnik analisis data yang digunakan adalah deskriptif analitik dengan pola berfikir induktif. Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data yaitu wawancara, observasi dan dokumentasi dan interview.

Temuan dari penelitian ini adalah *pertama*, bahwa pelaku usaha keripik pisang olahan yang tidak mempunyai sertifikasi halal dikarenakan tidak mengetahui prosedur pengajuan sertifikasi halal salah satunya dalam biaya. *Kedua*, penjadwalan audit lapangan yang dilakukan LPPOM MUI dihimbau untuk kejujuran bahan oleh pelaku usaha dan kurangnya audit internal yang bertanggungjawab menyebabkan sulitnya berkordinasi pada pelaku usaha tersebut yang di mana pelaku usaha hanya memberi laporan 6 bulan sekali pada LPPOM MUI. *Ketiga*, keterbatasan audit eksternal yang mengecek 6 bulan sekali menyebabkan pelaku usaha masih dapat menggunakan hak sertifikasi halal tanpa memperpanjang. *Keempat*, berdasarkan dalil Al-Qur'an dan Hadist produk kemasan makanan olahan yang tidak memiliki label halal termasuk dalam *subhat* yang sebaiknya dihindari. *Kelima*, sertifikasi halal sejalan dengan dalil Al-Qur'an dan Al-Hadist.



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

*Sekretariat: Jl. Letkol Hendro Suratmin, Universitas Islam Negeri Raden Intan, Sukarame, Bandar
Lampung Telp. (0721) 703289*

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Prosedur Pengajuan Sertifikasi Halal Pada Produk Makanan Olahan Keripik Pisang Studi pada Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia Provinsi Lampung (LPPOM MUI Provinsi Lampung)** disusun oleh **Ricky Prabowo NPM 1421030134 Jurusan Mu'amalah**, telah diujikan dalam sidang Munaqosah Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung, pada hari/tanggal: **Rabu/ 28 Maret 2018**

TIM DEWAN PENGUJI

Ketua : Marwin, S.H., M.H.
Sekretaris : Hendriyadi., S.H.I., M.H.
Penguji I : Dr. Jayusman, M. Ag.
Penguji II : Dr. H. Khairuddin, M.H.



Dr. Alamsyah, S.Ag., M.Ag
NIP. 197009011997031002



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

*Sekretariat: Jl. Letkol Hendro Suratmin, Universitas Islam Negeri Raden Intan, Sukarampe, Bandar
Lampung Telp. (0721) 703289*

PERSETUJUAN

Nama : Ricky Prabowo
NPM : 1421030134
Jurusan : Mu'amalah
Fakultas : Syariah
Judul Skripsi : **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Prosedur Pengajuan
Sertifikasi Halal Pada Produk Makanan Olahan Keripik
Pisang (Studi Di LPPOM MUI Provinsi Lampung)**

MENYETUJUI

Untuk dimunaqasahkan dan dipertahankan dalam sidang munaqasah Fakultas
Syariah UIN Raden Intan Lampung.

Pembimbing I

Dr. H. Khairuddin, M.H.
NIP.196210221993031002

Pembimbing II

Eti Karini, S.H., M.Hum.
NIP.197308162003122003

**Mengetahui
Ketua Jurusan Mu'amalah**

H.A. Khumedi Ja far, S.Ag., M.H.
NIP.197208262003121002

MOTTO

وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ

“Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah rizkikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya” (QS. Al- Mai’dah : 88)¹



¹Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, (Semarang: Asy-Syifa', 2001), h. 256.

PERSEMBAHAN

Skripsi sederhana ini yang kubuat tanpa adanya kebohongan kupersembahkan sebagai tanda cinta, sayang, dan hormat tak terhingga kepada:

1. Kedua orang tua ku Ayahanda Mulyono,S.E,. dan Rahayu Ningsih yang telah tulus membesarkan, membiayai serta mendoakan setelah aku menempuh pendidikan hingga dapat menyelesaikan pendidikan di UIN Raden Intan Lampung, senyum bahagia kalian menjadi tujuan terbesar dalam hidupku, semoga Allah SWT selalu melindungi kalian dimanapun kalian berada, *Amiin. jazakumullah khairan katsiran wa jazakumullah ahsanul jaza.*
2. Kakak- kakak ku Renny Kurniasari,S.H,. Arief Prayogi,S.Kom, dan M. Adhie Syahputra, S.Kep. yang senantiasa memberikan semangat, dorongan dan serta doa untuk keberhasilan Penulis. *Uhibuki Fillah.*
3. Doa ku untuk Almarhum Kakek Ku (Ibu) Veteran Pejuang Kemerdekaan RI Mayor TNI AD H.Thohir Qalbi Bin Halimi dan Nenek Alm. Hj. Zainab Shofiyati Binti Abdul Bashar. Dan kakek nenek Ku (Ayah) Alm. Maskur Bin Kasad Mulyani dan Nenek Hj. Siti Marsiah. Semoga di ampuni dosa-dosa mereka dan terimakasih telah melahirkan cucu-cucu yang hebat termasuk aku. *jazakallah khairan katsiran wa jazakallah ahsanul jaza.*
4. Kepada Pembimbing I Dr. Khairuddin Tahmid, M.H. yang membimbing dengan sabar dan senyum serta meluangkan waktu untuk membimbing skripsi ini dan Pembimbing II Ibu Eti Karini,S.H,M.Hum yang membimbing dengan sabar dan senyum serta meluangkan waktu untuk membimbing skripsi ini. *jazakumullah khairan katsiran wa jazakumullah ahsanul jaza.*

RIWAYAT HIDUP

Nama lengkap Penulis adalah Ricky Prabowo. Dilahirkan pada Rabu Siang pada saat gerhana matahari, tanggal 13 November 1995 di Bandar Lampung, Putra ke empat dari 4 bersaudara, dari pasangan yang diridhoi Allah SWT yaitu Bapak Mulyono S.E dan Ibu Rahayu Ningsih yang menikah pada tahun 1974.

Pendidikan penulis dimulai dari Taman Kanak-kanak TK Kartika II-6 Bandar Lampung pada tahun 2003, kemudian dilanjutkan dengan bersekolah di SD Kartika II-6 pada tahun 2008 dan lulus , SMP Negeri 7 Bandar Lampung pada tahun 2011 dan lulus, Melanjutkan di MA Darul A'mal Metro Barat dan lulus tahun 2014, kemudian melanjutkan pendidikan kejenjang pendidikan tinggi, pada Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung program Strata Satu (S1) Fakultas Syari'ah dengan mengambil jurusan Muamalah. Selesai Pada Hari Rabu, 28 Maret 2018 yang ditempuh dalam waktu 3 tahun 2 bulan 28 hari.

Ketika menempuh studi pada jenjang SMP, penulis pernah mengikuti organisasi seperti OSIS, IRM (Ikatan Remaja Muhammadiyah). Ketika SMA penulis aktif dalam organisasi ROHIS, WCVSN (Wall Vocational School Nusantara), Kemudian ketika penulis melanjutkan studi kejenjang perguruan tinggi penulis pernah mengikuti organisasi kemahasiswaan yaitu UKM Badan Pembinaan Dakwah (BAPINDA), UKMF GEM AIS, HMJ-MU. Email : riskiprabowo61@gmail.com.

Beberapa kegiatan lomba tingkat Nasional yang pernah penulis ikuti selama di perkuliahan yaitu:

1. National Essay Competition “Festival Ilmiah Mahasiswa (FILM) 2016” yang diselenggarakan pada tanggal 4-6 Maret 2016 oleh UKM Studi Ilmiah Mahasiswa di Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta.
2. National Essay Competition pada Festival Sastra 2016 yang diselenggarakan oleh Keluarga Mahasiswa Sastra Indonesia (KMSI UGM) pada tanggal 21 Mei 2016 di Universitas Gajah Mada (UGM) Yogyakarta.
3. National Essay Competition yang diselenggarakan oleh Lembaga Pers Mahasiswa Paradigma pada tanggal 13 January 2016 Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga (UIN SUKA) Yogyakarta.
4. National Essay Competition of Cendikia yang diselenggarakan oleh Badan Otonom UKM Cendikia FKIP UNSRI pada tanggal 10 January 2017 di Universitas Sriwijaya Indralaya Palembang.
5. National Essay Competition yang diselenggarakan oleh For Children “ The Role Of Youth To Make Community Aware To Children’s Rights” pada tanggal 15 January 2017 di Jakarta.
6. National Essay Competition “Festival Kreasi 2017 dengan tema Menuju Indonesia Mandiri” yang diselenggarakan oleh Event Hunter Indonesia 2017
7. Merupakan penulis buku Antology “Akhirnya Kami Meraihnya” penerbit Sinar Gramedia 2015. Dll.

KATA PENGANTAR

Assalammu`alaikum Wr. Wb.

Segala puji dan syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, atas segala rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian yang berjudul: **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Prosedur Pengajuan Sertifikasi Halal Pada Produk Makanan Olahan Keripik Pisang (Studi pada Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika) Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) Provinsi Lampung.** Sholawat dan salam semoga tetap dilimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarganya, sahabatnya, dan umatnya.

Skripsi ini ditulis sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan studi pada program Srata Satu (S1) Jurusan Ilmu Hukum Ekonomi (Mu`amalah) dan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang ilmu Syari`ah.

Atas bantuan semua pihak dalam proses penyelesaian Skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dan dukungan dari berbagai pihak oleh karena itu, pada kesempatan ini Penyusun juga ingin mengucapkan terimakasih kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini, kepada:

1. Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung
Dr. Alamsyah, S.Ag., M.H.
2. Ketua Jurusan Mu'amalah Universitas Islam Negeri Raden Intan
Lampung H.A. Khumedi Ja'far, S.Ag, M.H.
3. Kepada Pembimbing I Dr. Khairuddin Tahmid, M.H. yang membimbing
dengan sabar dan senyum serta meluangkan waktu untuk membimbing
skripsi ini dan Pembimbing II Ibu Eti Karini, S.H, M.Hum yang
membimbing dengan sabar dan senyum serta meluangkan waktu untuk
membimbing skripsi ini. *jazakumullah khairan katsiran wa jazakumullah
ahsanul jaza.*
4. Bapak dan Ibu Dosen, para staf karyawan Fakultas Syari'ah.
5. Kepala dan karyawan Perpustakaan Pusat dan Fakultas Syari'ah UIN
Raden Intan Lampung yang telah membantu memberikan informasi, data,
referensi.
6. Bapak Refliyanto, S.Pd, Ibu Ir. Susilawati, MS. Dan Ibu Ir. Otik Nawansih,
MP. selaku Narasumber di LP-POM MUI Provinsi Lampung yang telah
membantu dalam memberikan informasi yang dibutuhkan dalam
penelitian ini. *Jazakumullahuma*
7. Sahabatku yang selalu menyemangati ku Hudariana Jamil. Terimakasih
Saran dan bantuan Materil dan Moril. *jazakillah khairan katsiran wa
jazakillah ahsanul jaza.*

8. Untuk teman ku di Bogor Nur Chotimah terimakasih sudah sabar menasehatiku dari mei 2017 hingga sekarang. PPS,KKN, PPI dan waktu-waktu lain. *jazakillah khairan katsiran wa jazakillah ahsanul jaza.*
9. Sahabat-sahabat Penulis Sherly Charlina, Ka Abdul Mazkur, Bang Saddam yang saling berjuang dan memberi semangat satu sama lain. *Jazakumullahuma*
10. Para Guru dan Dosen Penulis yang membekali Penulis dengan ilmu yang bermanfaat.
11. Almamaterku tercinta Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung.
12. Kawan-kawan penulis, Maya Sari, Yunita Sendi, Ria Astuti, , Liana, Nurbaya, Anggi Hukniati, Sherly Charlina dan kawan-kawan yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, satu perjuangan semenjak kecil, kawan satu pemikiran, kawan penghibur lara, pembuat suasana tegang jadi mencair, pembuat suasana sunyi jadi ramai dan satu penanggung.
13. Teman-teman Jurusan Mu‘amalah A dan E Angkatan 2014 terima kasih atas kebersamaan, tawa tangis, dan keringat dalam menempuh pendidikan di kampus UIN Raden Intan Lampung.
14. Kawan-kawan PPS dan KKN terimakasih telah memberikan semangat yang baru, dan satu tujuan untuk berjuang.
15. Serta semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.
16. Almamaterku Tercinta Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, hal itu tidak disebabkan karena keterbatasan kemampuan, waktu dan dana yang dimiliki.

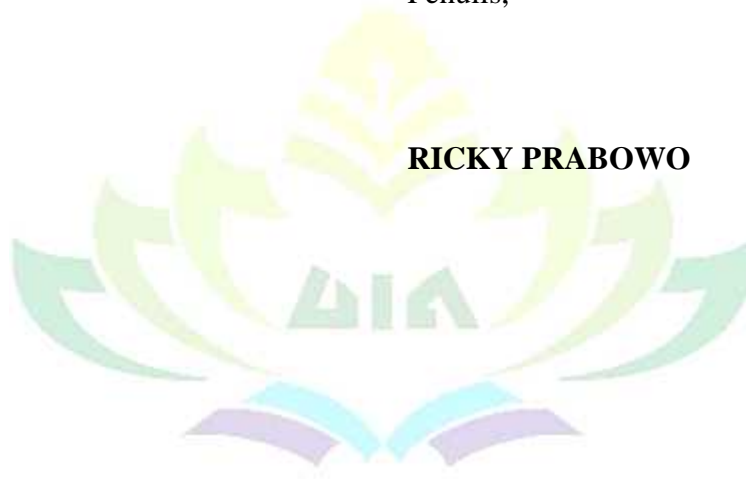
Untuk itu kiranya para pembaca dapat memberikan masukan dan saran-saran guna melengkapi tulisan ini.

Akhirnya, diharapkan betapapun kecilnya karya tulis (skripsi) ini dapat menjadi sumbangan cukup berarti dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu Keislaman.

Bandar Lampung, 16- Maret- 2018

Penulis,

RICKY PRABOWO



DAFTAR ISI

JUDUL	i
ABSTRAK	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
PENGESAHAN	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xii

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul.....	1
B. Alasan Memilih Judul.....	3
C. Latar Belakang Masalah	4
D. Rumusan Masalah	12
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	12
F. Metode Penelitian	13

BAB II LANDASAN TEORI SERTIFIKASI HALAL

A. Payung Hukum Pengaturan Sertifikasi Halal	
1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.....	24
2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan	28
3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal.....	30
4. Instruksi Presiden RI Nomor 2 Tahun 1991 Tentang Peningkatan Pembinaan Dan Pengawasan Produksi dan Peredaran Makanan Olahan.....	33

5. Akibat Hukum Bagi Pelaku Usaha yang Tidak Bersertifikat Halal	34
B. Konsep Islam Tentang Makanan dan Minuman Halal	
1. Pengertian Makanan dan Minuman Halal	43
2. Dasar hukum Makanan dan Minuman Halal	45
3. Syarat dan Kriteria Makanan dan Minuman Halal	49
4. Fatwa Majelis Ulama Indonesia Tentang Produk Halal	55

BAB III PROSES PENGAJUAN SERTIFIKASI HALAL DI LPPOM MUI PROVINSI LAMPUNG

A. Gambaran Umum Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia di Provinsi Lampung (LPPOM MUI di Provinsi Lampung)	
1. Sejarah Singkat Berdirinya LPPOM MUI di Provinsi Lampung.....	60
2. Visi dan Misi LPPOM MUI di Provinsi Lampung	62
3. Struktur Organisasi dan Pembagian Kerja di LPPOM MUI di Provinsi Lampung	63
4. Program Kerja LPPOM MUI di Provinsi Lampung	65
B. Sertifikasi Halal Majelis Ulama Indonesia Pada Makanan Olahan Keripik Pisang di Kota Bandar Lampung	
1. Tata Cara Proses Pembuatan Makanan Olahan Keripik Pisang di Kota Bandar Lampung	65
2. Sistem dan Prosedur Sertifikasi Halal	70

3. Akibat Hukum Penetapan Sertifikasi Halal LPPOM MUI Provinsi Lampung pada Makanan Olahan Keripik Pisang di Kota Bandar Lampung	76
--	----

BAB IV SERTIFIKASI HALAL DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM

A. Prosedur Pengajuan Sertifikasi Halal LPPOM MUI di Provinsi Lampung	81
B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Legalitas Sertifikasi Halal	92

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	100
B. Saran	103

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Bahan Makanan.....	51
------------------------------	----



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Agar tidak terjadi kesalah pahaman dalam memahami judul skripsi ini, maka penulis perlu menjelaskan istilah-istilah yang terdapat dalam skripsi ini. Adapun judul yang penulis bahas adalah **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PROSEDUR PENGAJUAN SERTIFIKASI HALAL PADA PRODUK MAKANAN OLAHAN KERIPIK PISANG (Studi Pada Lembaga Pengkajian Pangan, Obat obatan dan Kosmetika) Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) Provinsi Lampung.** Dengan uraian sebagai berikut :

1. Tinjauan adalah pendapat, meninjau, pandangan yang di dapat setelah menyelidiki, mempelajari. Tinjauan dalam Skripsi ini adalah menimbang memperhatikan dan memutuskan setelah menyelidiki dan mempelajari¹
2. Hukum Islam menurut istilah adalah ilmu pengetahuan mengenai hukum-hukum perilaku mukallaf secara syara' yang dihasilkan dari dalil-dalil terperinci.² Hukum Islam dalam hal ini mengenai perbuatan pelaku usaha dalam menjalankan prosedur pengajuan sertifikasi halal dari tahap awal hingga akhir di LPPOM MUI Provinsi Lampung.

¹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Inonesia Pusat Bahasa*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, ,Edisi ke 4, 2011), h. 325.

² Bunyana Sholihin, *Kaidah Hukum Islam Dalam Tertib dan Fungsi Legislasi Hukum dan Perundang-Undangan*, (Yogyakarta: Total Media, Cet. 1, 2016), h. 11.

3. Prosedur adalah tahap kegiatan untuk menyelesaikan suatu aktivitas; metode langkah demi langkah secara pasti dalam memecahkan suatu masalah. Prosedur yang menjadi penelitian ini adalah tata cara pengajuan sertifikasi halal di LPPOM MUI Provinsi Lampung.³
4. Sertifikasi Halal adalah pengakuan kehalalan suatu Produk yang dikeluarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJH) berdasarkan fatwa halal tertulis yang dikeluarkan oleh MUI.⁴
5. Produk adalah barang dan/atau jasa yang terkait dengan makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetik, serta barang guna yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh masyarakat.⁵
6. Makanan Olahan adalah Kumpulan dan teknik yang digunakan untuk mengubah bahan mentah menjadi makanan dan minuman menjadi bentuk lain untuk konsumsi.⁶ Dalam penelitian ini makanan olahan tersebut berjenis keripik pisang.

Berdasarkan istilah yang telah dikemukakan di atas maka yang dimaksud dalam skripsi ini adalah suatu kajian tentang prosedur pengajuan sertifikasi halal pada makanan olahan keripik pisang dalam tinjauan hukum Islam.

³ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, *Op.cit*, h. 655.

⁴ Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal pasal, 1 ayat (10)

⁵ Undang-Undang No 33 Tahun 2014, *Op.Cit*, pasal, 1, ayat (1)

⁶ www.Wikipedia.com diakses pada tanggal 25 April 2017 pukul 20.19 wib.

B. Alasan Memilih Judul

Adapun alasan-alasan penulis tertarik dalam memilih dan menentukan judul tersebut adalah :

1. Alasan Objektif

- a. Karena beberapa pelaku usaha makanan olahan keripik pisang Provinsi Lampung kurang menyadari pentingnya sertifikasi halal.
- b. Karena ketidaktahuan tentang prosedur pengajuan sertifikasi halal serta beberapa pelaku usaha tidak memperpanjang sertifikasi halal tetapi tetap menggunakan ID Produk yang lama.
- c. Konsumen membutuhkan kepastian, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan, karena itu kehalalan dibuktikan dengan adanya sertifikasi halal
- d. Permasalahan sertifikasi halal sedang menjadi topik yang bagus dikarenakan Undang-undang No.33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal sudah dibentuk.

2. Alasan Subjektif

- a. Judul ini dipilih karena sangat relevan dengan disiplin ilmu yang ditekuni di Fakultas Syari'ah jurusan Mu'amalah.
- b. Tersedianya sumber data dan literatur-literatur yang menjadi rujukan penelitian ini.

- c. penelitian ini dimaksudkan sebagai suatu syarat memenuhi tugas akhir guna memperoleh gelar S.H pada Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.

C. Latar Belakang

Ekonomi Islam menempatkan kemaslahatan individu (*self-interest*), dan kemaslahatan sosial (*social-interest*) sebagai tujuan, serta keadilan ekonomi, jaminan sosial, dan pemanfaatan sumber-sumber daya ekonomi sebagai prinsip fundamental prinsip ekonomi⁷

Islam memperlakukan kemaslahatan individu sebagai kekuatan konstruktif bagi kesejahteraan kolektif. Pandangan kemaslahatan (*self-interest*) yang tidak terkendali, seperti diajarkan Adam Smith (1723-1790), dan telah menjadi modal ekonomi modern, telah banyak dikritik para ahli ekonomi. Samir Abdul Hamid Ridwan mengomentari teori Adam Smith sebagai tindakan egois (*ananiah*), dan dia mengutip pandangan Adam Muller (1779-1892) yang menyatakan perlunya keterkaitan antara etika ekonomi dengan etika agama. Menurut Muller, kesulitan-kesulitan yang kita hadapi dalam kehidupan ekonomi disebabkan manusia telah melupakan kekuatan Tuhan Yang Maha Agung.

Etika ekonomi Islam berkaitan erat dengan hukum ekonomi Islam, di mana kejelasan suatu produk adalah hal yang menjadi dasar dari pembuatan

⁷Rifah Al-Mahjub, *Dirasat iqtisadiyat Islamiyah*, (Kairo: Ma'had Ad-Dirasat Al-Isalmiyah), h. 14.

produk itu sendiri.⁸ Dalam hal ini salah satu permasalahan nya adalah pengajuan sertifikasi halal yang dilakukan makanan olahan produk keripik pisang yang sulit mendapat sertifikasi halal, di mana selalu mengalami kegagalan pengajuan. Sehingga produk mereka menjadi *subhat* (ketidakjelasan).

Hubungan antara konsumen dan pelaku usaha, pada dasarnya adalah hubungan hukum yang berbentuk perjanjian timbal balik seperti perjanjian jual beli, perjanjian sewa menyewa, dan lain-lain. Setiap perjanjian yang dibuat secara sah akan mengakibatkan akibat hukum berupa hak dan kewajiban⁹

Mengingat alur proses sertifikasi halal yang panjang dan melibatkan banyak pihak akan membutuhkan waktu yang lama dan menyulitkan pelaku usaha, serta rawan terjadi *conflict of interest* (konflik kepentingan) karena Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJH) menetapkan siapa Lembaga Penjamin Halal (LPH) yang akan digunakan untuk melakukan pemeriksaan dan/atau pengujian produk. Di samping itu, MUI sebagai lembaga yang mengeluarkan fatwa halal juga memiliki LPH yaitu LPPOM MUI. Hal tersebut dapat menimbulkan dominasi LPH yang melakukan pemeriksaan dan/atau pengujian produk

⁸Gunawan Widjaya dan Ahmad Yani, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, Cet. ke-3, 2000), h. 11.

⁹“Tinjauan Pustaka: Beberapa Teori Perlindungan Hak-Hak Konsumen dalam E-Commerce, tersedia di : (<http://e-journal.uajy.ac.id/319/4/2MIH01712.pdf>, diakses 10 Juni 2017).

Dalam hal ini, usaha kecil dan menengah produk makanan olahan keripik pisang di Bandar Lampung dalam mendapatkan sertifikat halal harus mendaftarkan produknya dengan biaya yang telah disesuaikan. Apabila usaha kecil dan menengah tersebut masih ada produk lain yang di daftarkan maka ada biaya tambahan. Hal ini sudah diatur dalam LPPOM MUI untuk mendapatkan sertifikasi halal maka kebanyakan usaha kecil menengah produk makanan olahan keripik pisang tidak mendaftarkannya dan juga karena mereka menyakini bahan-bahannya telah sesuai dengan ketentuan Undang-undang kesehatan yang berlaku¹⁰ karena hal ini dapat dikatakan produk makanan mereka dikategorikan sebagai produk *subhat* (Ketidakjelasan dalam bahan).

Rasul Muhammad Saw bersabda¹¹ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ التُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : إِنَّ الْحَلَالَ بَيِّنٌ وَإِنَّ الْحَرَامَ بَيِّنٌ وَبَيْنَهُمَا أُمُورٌ مُشْتَبِهَاتٌ لَا يَعْلَمُهُنَّ كَثِيرٌ مِّنْ

Artinya : “Dari Abu Abdillah Nu'man bin Basyir r.a,”Saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, ‘Sesungguhnya yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas. Di antara keduanya terdapat perkara-perkara yang syubhat (samar-samar) yang tidak diketahui oleh orang banyak (HR. Bukhari dan Muslim)

¹⁰Thabieb Al-Asyhar, *Bahaya Makanan Haram bagi Kesehatan Jasmani dan Kesucian Rohani*, (Jakarta: PT. Al-Mawardi Prima, 2002), h. 18-19.

¹¹ Ahmad H. Syakr, *Petunjuk Makanan Secara Islami*, (Bandung: Nuansa, 2016), h. 34.

Indonesia sebenarnya cukup produktif dalam membuat perangkat undang-undang atau peraturan yang memberi perlindungan terhadap masyarakat. Saat ini Indonesia telah memiliki ketentuan perundang-undangan yang mengatur dan memberikan perlindungan bagi konsumen. Tepatnya sejak Indonesia membentuk dan menetapkan UU No. 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan, UU Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan Menggantikan Undang-undang Pangan No.7 Tahun 1996, UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Peraturan Pemerintah No. 69 Tahun 1999 Tentang Label dan Iklan Pangan, yang terbaru UU RI No.33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal. Peraturan tersebut mewajibkan semua produk harus terjamin kehalalannya.¹²

Majelis Ulama Indonesia melalui Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika (LPPOM) dan Komisi Fatwa telah berikhtiyar untuk memberikan jaminan makanan halal bagi konsumen muslim melalui instrumen sertifikat halal. Sertifikat halal merupakan fatwa tertulis Majelis Ulama Indonesia yang menyatakan kehalalan suatu produk sesuai dengan syari'at Islam. Sertifikat halal ini bertujuan untuk memberikan kepastian

¹²Bagian Proyek Sarana dan Prasarana Produk Halal Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, *Modul Pelatihan Auditor Internal Halal*, (Jakarta : Departemen Agama RI, 2003), h. 62.

kehalalan suatu produk sehingga dapat menenteramkan batin yang mengkonsumsinya.¹³

Dalam pelaksanaanya, LPPOM melakukan pengkajian dan pemeriksaan dari tinjauan sains terhadap produk yang akan disertifikasi. Jika berdasarkan pendekatan sains telah didapatkan kejelasan maka hasil pengkajian dan pemeriksaan tersebut dibawa ke Komisi Fatwa untuk dibahas dari tinjauan syari'ah. Pertemuan antara sains dan syari'ah inilah yang dijadikan dasar penetapan oleh Komisi Fatwa, yang selanjutnya dituangkan dalam bentuk sertifikat halal oleh MUI.¹⁴ Pelaksanaan untuk mengetahui bahan dan proses pengolahannya dengan cara Audit Halal mendatangi perusahaan pelaku usaha tersebut. Sebelum diadakan audit halal penjadwalan hari dan tanggal ditetapkan dan di informasikan kepada pelaku usaha. Salah satu yang dikhawatirkan ialah adanya manipulasi bahan yang dilakukan oleh pelaku usaha saat jadwal audit dilaksanakan. Terlebih dengan kurang SDM audit eksternal untuk melakukan cek 6 bulan sekali yangi tidak memungkinkan dan LPPOM hanya menerima laporan berkala 6 bulan sekali. Permasalahan yang lebih spesifik ialah ketika sudah habis masa berlaku sertifikasi halal tetapi pelaku usaha tetap menggunakan nomor registrasi sertifikasi halal.

¹³Bagian Proyek Sarana dan Prasarana Produk Halal Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, *Panduan Sertifikasi Halal*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2003), h. 52.

¹⁴Lukmanul Hakim, *Sertifikasi Halal MUI Sebagai Upaya Jaminan Produk Halal*, (Jakarta: Majelis Ulama Indonesia, Cet. Ke-1, 2009), h. 279-280.

Apabila usaha kecil dan menengah menyadari pentingnya sertifikasi dan mengetahui prosedur pengajuan sertifikasi halal, maka akan menguntungkan kedua pihak (penjual dan pembeli) diantaranya :

Pertama, dari sisi normatif. Dalam perspektif ini melihat secara kasat mata, sebagian besar pelaku usaha, bisnis dan masyarakat yang bersentuhan dengan kegiatan ekonomi, industri dan teknologi adalah beragama Islam. Maka dari sisi normatif keagamaan, telah jelas bahwa umat Islam diwajibkan mengkonsumsi makanan halal, bukan makanan yang diharamkan atau najis.

Dalam Surat Al-Baqarah ayat 168 Allah SWT berfirman :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطَوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ

Artinya: *“Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan, karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu. (QS. Al- Baqarah: 168)”*¹⁵

Kedua, dari sisi yuridis. Sertifikat halal MUI menjadi satu pendorong moral dan ketentuan yang mempunyai daya ikat tinggi bagi para pelaku ekonomi , bisnis dan konsumen terutama yang beragama Islam.

¹⁵Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, (Semarang : CV. Asy Syifa, 2001), h. 56..

Ketiga, secara sosiologis. Tentu dalam perspektif ini ada satu kecenderungan dalam masyarakat untuk melihat sertifikasi dan labeliasi halal menjadi satu perangkat hukum yang mengikat bagi para pelaku ekonomi khususnya yang beragama Islam.

Mengingat Pelaksanaan JPH di Indonesia selama 25 tahun ini dilakukan oleh lembaga keulamaan LPPOM MUI. Namun, dalam pelaksanaannya belum ada payung hukum yang kuat yang mengatur standar kehalalan dan lembaga sertifikasi. Padahal, adanya Jaminan Produk Halal (JPH) merupakan salah satu upaya perlindungan konsumen yang dilakukan pemerintah bagi warga negaranya. UU JPH yang telah disetujui DPR RI diharapkan dapat menjawab beberapa permasalahan yang ada dalam pelaksanaan JPH di Indonesia. Permasalahan utama terkait pelaksanaan JPH tersebut antara lain jaminan sertifikasi yang sesuai dengan kaidah syariah, kompetensi lembaga sertifikasi, standar halal yang digunakan, personil yang terlibat dalam sertifikasi dan auditing, serta mekanisme sertifikasi halal itu sendiri.

Masalah yang berkaitan dengan sertifikasi halal yang belum disinggung oleh para ijtihad atau pemikiran para ulama pada masa lalu, karena memang tidak merupakan fenomena masyarakat muslim pada saat itu. Sehingga penentuan kehalalan suatu produk hanya yang diharamkan yang ada di Qur'an dan Hadist. Dalam hal ini MUI menerbitkan sertifikasi halal untuk melindungi konsumen muslim, hal ini adalah buatan manusia bukan Perintah langsung.

Allah SWT hanya memberikan penegasan makanan yang halal yang harus di konsumsi dan tidak adanya keharaman dalam makanan tersebut.

Melihat berbagai realita produk olahan yang haram dan berbahaya, ternyata masih banyak usaha kecil menengah keripik pisang yang belum mengetahui prosedur pengajuan sertifikasi. Seperti yang dilakukan oleh sebagian besar (untuk tidak mengatakan seluruhnya) Usaha Kecil dan Menengah (UKM) keripik pisang di jalan Pagar Alam Kota Bandar Lampung. Mereka kurang menyadari bahwa produk yang mereka hasilkan perlu dijamin kehalalannya karena produk tersebut akan dikonsumsi oleh masyarakat luas termasuk umat Islam.

Terlebih lagi produk-produk yang mereka pasarkan berada dalam daerah yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Setiap konsumen muslim mempunyai hak untuk memperoleh jaminan bahwa produk-produk yang dikonsumsi adalah halal. Sementara tidak semua konsumen seiring dengan rumitnya masalah teknologi pangan yang terus berkembang dapat mengetahui kehalalan produk makanan.¹⁶

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk membahas lebih lanjut dalam bentuk skripsi mengenai bagaimana prosedur pengajuan sertifikasi halal agar mengetahui prosedur yang sesuai aturan dan tak menyimpang serta bagaimana tinjauan hukum islam tentang legalitas sertifikasi halal. Maka

¹⁶Ichwan Sam, et. al., *Ijma' Ulama Keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia III Tahun 2009*, (Jakarta: Majelis Ulama Indonesia, Cet. ke-1, 2009), h. 84.

judul yang penulis angkat dalam penelitian ini adalah: **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PROSEDUR PENGAJUAN SERTIFIKASI HALAL PADA PRODUK MAKANAN OLAHAN KERIPIK PISANG (Studi Pada Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika) Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) Provinsi Lampung**

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang diatas, untuk lebih sistematisnya perlu dirumuskan permasalahan tentang hal ini. Adapun permasalahan dalam penelitian itu dapat penulis formulasikan sebagai berikut :

1. Bagaimana prosedur pengajuan sertifikasi halal di LP POM MUI di Provinsi Lampung ?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap legalitas Sertifikasi Halal ?

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Setiap penelitian pasti memiliki tujuan tertentu, dan dengan rumusan masalah diatas maka tujuan dalam penelitian ini adalah

- a. Untuk mengetahui tata cara prosedur pengajuan sertifikasi halal pada produk makanan okahan keripik pisang di LPPOM MUI Provinsi Lampung
- b. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap legalitas sertifikasi halal.

2. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, maka hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik manfaat dalam bidang teoritis maupun dalam bidang praktis. Adapun manfaat penelitian yang diharapkan sesuai dengan fokus penelitian adalah sebagai berikut :¹⁷

- a. Secara teoritis, bagi masyarakat dengan penelitian ini penulis mengharapkan dapat berguna untuk mengangkat permukaan tentang prosedur pengajuan sertifikasi halal. Apabila dikemudian hari dikhawatirkan indikasi bahan haram akan ditinjau legalitasnya secara Islam. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat pula bermanfaat pula bagi seluruh akademisi khususnya sebagai bahan informasi dan bahan penelitian tentang permasalahan, hukum islam dan positif, dan sertifikat halal serta diharapkan pelaku usaha kecil dan menengah di Bandar Lampung lebih memperhatikan jaminan kehalalan produk-produk olahan yang dibuat

¹⁷Firman Sujadi, *Lampung Sai Bumi Ruwa Jurai*, (Jakarta: Cita Insan Madani, 2012), h.73.

- b. Secara praktis, penelitian ini dimaksudkan sebagai suatu syarat memenuhi tugas akhir guna memperoleh gelar S.H pada Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.

F. Metode Penelitian

Agar sistematisnya dan akurat dalam pencapaian tujuan ini maka metode yang digunakan adalah :

1. Jenis Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Metode Kualitatif adalah suatu penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan dan menganalisa fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, pemikiran orang secara individu maupun kelompok¹⁸. Alasan menggunakan metode ini adalah karena untuk mengkaji permasalahan prosedur pengajuan sertifikasi halal. Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yaitu sebuah penelitian yang data-data pokoknya digali melalui pengamatan-pengamatan dan sumber-sumber data di lapangan. Penelitian dilakukan dengan berada langsung pada objeknya, sebagai usaha untuk mengumpulkan data dan berbagai informasi tentang prosedur serta permasalahan dalam menjalankan kewenangan sertifikat halal.

Selain penelitian lapangan, dalam penelitian ini juga menggunakan penelitian kepustakaan (*library research*) sebagai pendukung dalam

¹⁸ Syaodih Nana Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: PT.Remaja Rosdakarya, 2011), h. 9.

melakukan penelitian, dengan menggunakan berbagai literature yang ada dipergustakaan yang relevan dengan masalah yang diangkat untuk diteliti.¹⁹

2. Sifat Penelitian

Penulis menggunakan metode penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif analisis. Penelitian Deskriptif analisis adalah penelitian yang bermaksud untuk membuat pencandraan (deskripsi) mengenai situasi-situasi atau kejadian kejadian.²⁰ Dari pengertian tersebut dapat dipahami bahwa penelitian deskripsi adalah menguraikan atau memaparkan situasi atau kejadian yang diteliti. Dalam penelitian ini, peneliti berusaha menguraikan atau memaparkan data dari hasil survey dan membandingkan dengan pustaka yang ada.

3. Sumber dan Jenis Data

1. Sumber Data

Sumber data yang utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan refrensi lain.²¹ Peneliti menggunakan dua sumber data untuk mencari dan mengumpulkan sumber data dalam penelitian ini, dan hasil data yang akan diolah, yaitu :

¹⁹Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung : Alfabeta, 2012), h. 243.

²⁰Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1983). h. 76.

²¹Lexy Maleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2010), h. 155.

a. Sumber Data Primer

Data primer adalah data yang diambil secara langsung oleh peneliti kepada sumbernya tanpa ada perantara. Peneliti mencari dan menemukan data kepada informan baik wawancara maupun pengamatan langsung di lapangan. Kata-kata dan tindakan orang yang diamati atau diwawancarai merupakan sumber data yang utama.²² Disini akan mengambil data langsung dari sumber asli yaitu 3 bidang yang membidangi masalah prosedur pengajuan sertifikasi halal, yaitu bidang standar dan sistem informasi manajemen, bidang pelatihan, dan bidang pengkajian dan penelitian dan 2 pelaku usaha keripik pisang olahan.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data tidak langsung yang mampu memberikan tambahan serta penguatan terhadap data penelitian. Sumber data dalam penelitian kualitatif ini selain berupa kata-kata, bahasa dan tindakan dari informan juga dapat diperoleh melalui studi kepustakaan dengan media buku yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti dan media internet untuk mendukung analisis dan pembahasan. Selain itu juga akan mengambil data dari arsip-arsip dan foto-foto pada saat penelitian berlangsung. Agar penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan,

²²*Ibid.*

maka sumber data menjadi sangat penting sehingga akan didapatkan hasil penelitian yang benar-benar mendetail.²³

2. Jenis Data

Jenis data penelitian ini yaitu jenis data kualitatif, yaitu data yang disajikan dalam bentuk kata verbal bukan dalam bentuk angka.²⁴ yang termasuk data kualitatif dalam penelitian ini yaitu gambaran umum obyek penelitian, meliputi: Sejarah singkat berdirinya, struktur organisasi dan pembagian kerja, serta prosedur pengajuan sertifikasi halal di LPPOM MUI Provinsi Lampung.

4. Responden

Menurut Suharsimi Arikunto, "Responden adalah orang-orang yang merespon atau menjawab pertanyaan penelitian baik pertanyaan tertulis maupun lisan".

Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa metode penentuan responden adalah suatu cara yang digunakan untuk menentukan orang-orang yang ditunjuk untuk menjawab dan memberikan keterangan terhadap masalah yang diteliti baik secara tertulis maupun lisan. Dalam penelitian ini, yang menjadi responden adalah 3 bidang LPPOM MUI.

5. Teknik Pengumpulan Data

²³*Ibid*, h. 105.

²⁴Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta : Rakesarasin, 1996), h. 225

Pengumpulan data adalah proses pengadaan data untuk keperluan penelitian. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam usaha menghimpun data untuk penelitian ini, digunakan beberapa metode, yaitu :²⁵

a. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data mempunyai ciri yang spesifik bila dibandingkan dengan teknik yang lain, yaitu wawancara dan kuesioner.

- a) Observasi Berperan serta (*Participant Observation*) adalah peneliti terlibat dengan kegiatan sehari-hari orang yang sedang diamati atau yang digunakan sebagai sumber data peneliti.
- b) Observasi non partisipan adalah peneliti tidak terlibat dan hanya sebagai pengamat independen.
- c) Observasi terstruktur adalah observasi yang telah dirancang secara sistematis, tentang apa yang diamati, kapan dan di mana tempatnya.
- d) Observasi tidak terstruktur adalah observasi yang tidak dipersiapkan secara sistematis tentang apa yang diamati, kapan dan di mana tempatnya.

Observasi ini dilakukan dengan cara mengumpulkan data langsung dari objek penelitian, tidak hanya terbatas pada pengamatan saja melainkan juga pencatatan dilakukan guna memperoleh data yang kongkrit dan jelas. Jenis

²⁵ *Ibid*, h. 155.

observasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi terstruktur, yaitu peneliti telah mengetahui terkait kewenangan menjalankan sertifikat halal pada produk makanan olahan keripik pisang dan akan secara langsung ke tempat pembuatan sertifikat halal. Dalam hal ini LPPOM MUI Lampung.²⁶

b. Interview atau wawancara

Dalam interview ini akan mengadakan wawancara kepada pihak-pihak yang dianggap sangat berkompeten dengan permasalahan yang akan dibahas dan dapat memberikan data dan informasi yang diperlukan.

Apabila dilihat dari sifatnya atau tehnik pelaksanaannya, maka interview ini dibagi tiga macam :

1. Interview terpimpin adalah wawancara yang menggunakan pokok-pokok masalah yang diteliti.
2. Interview tak terpimpin (bebas) adalah proses wawancara di mana interviewer tidak sengaja mengarahkan tanya jawab pada pokok-pokok dari fokus penelitian dan interviewer.
3. Interview bebas terpimpin adalah kombinasi keduanya, pewawancara hanya membuat pokok-pokok masalah yang akan diteliti, selanjutnya dalam proses wawancara berlangsung mengikuti situasi.

²⁶Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan (pendekatan Kuantitatif, kualitatif, dan R&D)*, Alfabet, Bandung, 2012, h. 204-205.

Berdasarkan pendapat di atas, bentuk interview yang digunakan adalah bebas terpimpin, yaitu penelitian terlebih dahulu mempersiapkan kerangka pertanyaan dan kepada responden diberi kelulasaan dan kebebasan dalam mengemukakan jawabannya.

Metode ini digunakan untuk memahami dan mengetahui data-data prosedur pengajuan sertifikasi halal agar tak menemukan kendala dan permasalahan saat pengajuan dilaksanakan.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumentasi bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dalam penelitian kualitatif, dokumentasi merupakan pelengkap dari penggunaan teknik observasi dan wawancara yang digunakan dalam penelitian kualitatif. Hasil pengumpulan data dari wawancara dan observasi akan lebih kredibel atau dapat dipercaya apabila didukung dengan dokumentasi.²⁷ Dokumentasi dalam penelitian ini adalah foto-foto atau gambar-gambar dan arsip mengenai serangkaian kegiatan yang dilakukan peneliti saat berada di lapangan.

6. Teknik Pengolahan Data

Data yang telah dikumpulkan kemudian diolah, pengolahan data pada umumnya dilakukan dengan cara :

²⁷ Sugiyono, *Op. Cit*, h. 328.

1. Pemeriksaan data (*editing*), yaitu mengoreksi apakah data yang terkumpul sudah cukup lengkap sudah benar dan sesuai atau relevan dengan masalah.²⁸
2. Penandaan data (*coding*), yaitu memberikan catatan atau tanda yang menyatakan jenis sumber data pemegang hak cipta atau urutan rumusan masalah²⁹
3. Rekonstruksi data (*recontructioning*), yaitu menyusun ulang data secara teratur, berurutan logis sehingga mudah dipahami dan diinterpretasikan.
4. Sistematis (*systematizing*), yaitu menempatkan data menurut kerangka sistematika bahan berdasarkan urutan masalah³⁰

7. Teknik Analisis Data

Sebagai tindak lanjut pengumpulan data, maka analisis data menjadi sangat signifikan untuk menuju penelitian ini dan dalam menganalisa data penulis menggunakan metode deskriptif analitik.³¹ Kerja dari metode

²⁸*Ibid*, h. 140.

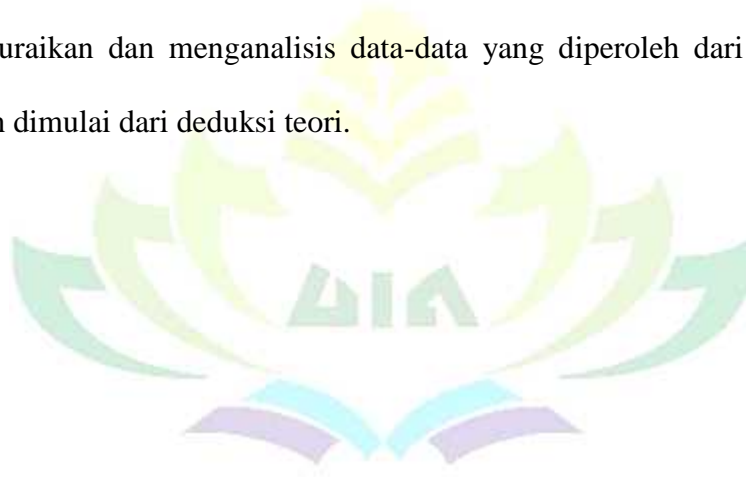
²⁹Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan penelitian*, (Bandung: PT.Citra Asitya Bhakti, 2004), h. 126.

³⁰*Ibid*, h. 127.

³¹*Deskriptif* berarti menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, dan untuk menentukan frekuensi penyebaran suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat. Analisis adalah jalan yang dipakai untuk mendapatkan ilmu pengetahuan ilmiah dengan mengadakan pemerincian terhadap obyek yang diteliti dengan jalan memilah-milah antara pengertian yang satu dengan pengertian yang lain untuk sekedar memperoleh kejelasan mengenai halnya (Sudarto, *Metode Penelitian Filsafat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996, h. 47-59).

deskriptif analitik adalah dengan cara menganalisis data yang diteliti dengan memaparkan data-data tersebut kemudian diperoleh kesimpulan.³²

Metode deskriptif analitik ini akan penulis gunakan untuk mengetahui dan memahami prosedur pengajuan sertifikasi halal di LPPOM MUI Lampung, yang mana pelaku usaha kurang menyadari pentingnya sertifikasi halal untuk kebaikan, keamanan dan keselamatan umat. Untuk menganalisis data dalam penelitian ini penulis menggunakan pola berfikir induktif.³³ Teknik analisis dengan pola berfikir induktif merupakan metode analisis yang menguraikan dan menganalisis data-data yang diperoleh dari lapangan dan bukan dimulai dari deduksi teori.



³²Suharsimi Arikunto Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2002), h. 51.

³³*Berfikir induktif* adalah proses logika yang berangkat dari data empirik lewat observasi menuju kepada suatu teori. Dengan kata lain induksi adalah proses mengorganisasikan fakta-fakta atau hasil-hasil pengamatan yang terpisah-pisah menjadi suatu rangkaian hubungan atau suatu generalisasi. Pola berfikir induktif berkebalikan dengan *polaberfikir deduktif* yaitu proses pendekatan yang berangkat dari kebenaran umum mengenai suatu fenomena (teori) dan menggeneralisasikan kebenaran tersebut pada suatu peristiwa atau data tertentu yang berciri sama dengan fenomena yang bersangkutan (prediksi) (Saifudin Azwar, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet. ke-1, 1998), h. 40).



BAB II

LANDASAN TEORI TENTANG SERTIFIKASI HALAL

A. Payung Hukum Sertifikasi Halal

1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

a. Pengertian Perlindungan Konsumen

Sebelum menguraikan tentang perlindungan konsumen, akan mendefinisikan dahulu tentang konsumen. Konsumen dalam pembahasan ini adalah konsumen pada kegiatan jual beli. Adanya pembeli berarti adanya penjual. Antara penjual dan pembeli erat kaitannya dan tidak dapat dipisahkan.

Kata penjual berasal dari kata jual dan pembeli berasal dari kata beli. Dikarenakan kegiatan penjual dan pembeli tidak dapat dipisahkan, maka disebutlah jual dan beli.

Dengan demikian, konsumen dapat diartikan dengan “orang yang memakai barang-barang hasil industri (bahan pakaian, makanan dan lain sebagainya). Istilah konsumen yang dimaksud adalah konsumen dalam pengertian konsumen akhir, yaitu setiap orang yang mendapatkan barang atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup pribadi, keluarga, rumah tangga dan tidak untuk keperluan komersial.”¹

¹A. Nasution, SH, *Konsumen dan hukum*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1995), h. 73.

Berdasarkan uraian di atas dapat dijelaskan bahwa perlindungan konsumen adalah “ segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen”.²

b. Dasar Hukum Perlindungan Konsumen

Dasar hukum dari pelaksanaan perlindungan konsumen dalam persepektif hukum positif yaitu :

1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1961 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 1961 tentang barang menjadi Undang-undang.
2. Undang-undang Nomor 2 tahun 1966 tentang hygiene.
3. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib daftar perusahaan.
4. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 yang mengatur tentang perlindungan konsumen.

c. Tujuan Perlindungan Konsumen

1. Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri.
2. Harkat dan martabat konsumen dengan menghindarinya dari akses negatif pemakaian barang dan/jasa.
3. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen.

²Tim Penyusun, *Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*, Bandung: Citra Umbaran, 2007), h. 2.

4. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi.
5. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggungjawab dalam berusaha.
6. Meningkatkan kualitas barang dan/jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.³

a. Hak dan Kewajiban Konsumen

Menurut ketentuan pasal 4 Undang-undang perlindungan konsumen, konsumen memiliki hak-hak sebagai berikut:⁴

1. Hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa.
2. Hak untuk memilih.
3. Hak untuk mendapatkan informasi yang benar
4. Hak untuk didengar
5. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut

³Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014), h. 4.

⁴Muhammad dan Alimin, *Etika dan Perlindungan Konsumen dalam Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi UGM*, (Yogyakarta: 2004, h. 129

6. Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen
7. Hak untuk diperlakukan dan dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
8. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian
9. Hak-hak diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Kewajiban-kewajiban konsumen ini terdapat di dalam pasal Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Adapun kewajiban-kewajiban konsumen tersebut adalah sebagai berikut :

1. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan.
2. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang/atau jasa.
3. Membayar sesuai nilai tukar yang disepakati.
4. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa secara patut.

Berdasarkan kedua pasal diatas jelas sudah bahwa konsumen berhak mendapatkan yang benar, jelas dan jujur dan mengenai kondisi dan jaminan barang/atau jasa dan berkewajiban membaca dan mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan. Berarti kewajiban pengusaha yang membuat produk harus memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai

kondisi dan jaminan barang atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan.⁵

Bagi orang muslim ketentuan mengenai informasi halal tidaknya suatu produk merupakan hal yang penting, karena menyangkut pelaksanaan syariat. Maka baiklah bilamana di Indonesia yang masyarakatnya mayoritas Muslim dapat terjamin haknya untuk mengetahui halal tidaknya suatu produk. Jadi dalam pemberian sertifikasi halal bertujuan memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum terhadap konsumen.⁶

b. Azas-azas Perlindungan Konsumen

Dalam pasal 2 UU N0.8/ 1999, tentang Azas Perlindungan Konsumen: “Perlindungan konsumen berdasarkan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum”.

1. Azas Manfaat

Mengamanatkan bahwa segala upaya dalam penyelenggaraan perlindungan ini harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan.

2. Azas Keseimbangan

Memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti materil ataupun spiritual.

⁵Sofyan Hasan, *Sertifikasi Halal Dalam Hukum Positif Regulasi dan Implementasi di Indonesia*, (Yogyakarta: Aswaja Presindo, 2014), h. 261

⁶*Ibid*, hlm. 261

3. Azas Keamanan dan Keselamatan Konsumen

Memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan.

4. Azas Kepastian Hukum

Baik pelaku usaha maupun konsumen mentaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta negara menjamin kepastian hukum.⁷

2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan

Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 mengamanatkan bahwa tujuan didirikan Negara Republik Indonesia, antara lain adalah untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Amanat tersebut mengandung makna negara berkewajiban memenuhi kebutuhan setiap warga negara melalui sistem pemerintahan yang mendukung terciptanya keamanan pangan yang memadai dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar dan hak setiap warga negara. Demikian halnya dalam konsiderans huruf a Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan menyatakan bahwa pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang pemenuhannya menjadi hak asasi setiap rakyat Indonesia dalam mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas untuk melaksanakan pembangunan nasional.

⁷ Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 2

Di dalam Undang- undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (UU Pangan) terdapat beberapa Pasal berkaitan dengan masalah kehalalan produk pangan, yaitu dalam bab VIII Label dan Iklan Pangan. Pasal 97, ayat (1), (2) dan (3). Bunyi pasal 97 dan penjelasan pasal tersebut adalah sebagai berikut :

- 1) Setiap Orang yang memproduksi Pangan di dalam negeri untuk diperdagangkan wajib mencantumkan label di dalam dan/atau pada kemasan Pangan .
- 2) Setiap Orang yang mengimpor pangan untuk diperdagangkan wajib mencantumkan label di dalam kemasan dan/atau pada Kemasan Pangan pada saat memasuki wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 3) Pencantuman label di dalam dan/atau pada Kemasan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditulis atau dicetak dengan menggunakan bahasa Indonesia serta memuat paling sedikit keterangan mengenai :
 - a. nama produk;
 - b. daftar bahan yang digunakan;
 - c. berat bersih atau isi bersih;
 - d. nama dan alamat pihak yang memproduksi atau mengimpor;
 - e. halal bagi yang dipersyaratkan;
 - f. tanggal dan kode produksi;
 - g. tanggal, bulan, dan tahun kadaluwarsa;
 - h. nomor izin edar bagi Pangan Olahan; dan

- i. asal usul bahan Pangan tertentu.

Dengan pencantuman halal pada label pangan, dianggap telah terjadi pernyataan dimaksud dan setiap orang yang membuat pernyataan tersebut bertanggung jawab atas kebenaran pernyataan tersebut.⁸

3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal

Pengaturan tentang sertifikasi halal dalam memberikan perlindungan konsumen muslim terdapat pada Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal (JPH). Undang-undang ini mengatur hak dan kewajiban pelaku usaha yang tertuang dalam pasal 23 sampai dengan pasal 27. Dalam pasal 26 pelaku usaha yang memproduksi produk dari bahan yang berasal dari bahan yang diharamkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 dan pasal 20 dikecualikan dari mengajukan permohonan sertifikat halal. Perlindungan hukum terhadap konsumen tidak hanya menyangkut kehalalan produk. Dalam Undang-Undang ini juga memberikan pengecualian terhadap pelaku usaha yang memproduksi produk dari bahan berasal dari bahan yang diharamkan dengan kewajiban mencantumkan secara tegas keterangan tidak halal pada kemasan produk atau pada bagian tertentu dari produk yang mudah dilihat, dibaca, tidak mudah terhapus, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari produk.

⁸ Sofyan Hasan, *Sertifikasi Halal Dalam Hukum Positif Regulasi dan Implementasi di Indonesia*, Yogyakarta, 2014, *Op.cit*, h. 263.

Untuk menjamin ketersediaan produk halal, ditetapkan bahan baku produk yang dinyatakan halal, baik bahan yang berasal dari bahan baku hewan, tumbuhan, mikroba, maupun bahan yang dihasilkan melalui proses kimiawi, biologi, atau proses rekayasa genetik. Disamping itu ditentukan PPH yang merupakan rangkaian kegiatan untuk menjamin kehalalan produk yang mencakup: penyediaan bahan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian produk.⁹

Dalam Penjelasan Pasal 2 Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal juga diatur tentang asas-asas penyelenggaraan jaminan produk halal (JPH), yaitu;

1. Asas perlindungan adalah bahwa dalam menyelenggarakan JPH bertujuan melindungi masyarakat muslim
2. Asas keadilan, bahwa dalam penyelenggaraan JPH harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara
3. Asas kepastian hukum, adalah bahwa penyelenggaraan JPH bertujuan memberikan kepastian hukum mengenai kehalalan suatu produk yang dibuktikan dengan sertifikasi halal.
4. Asas akuntabilitas dan transparansi adalah bahwa kegiatan penyelenggaraan JPH harus dapat dipertanggungjawabkan kepada

⁹Asri, "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Produk Pangan Yang Tidak Bersertifikat Halal", *Jurnal Kajian Hukum dan Keadilan (Matara, Agustus 2016)*, vol IV No. 2, h. 8-9.

masyarakat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5. Asas efektivitas dan efisiensi adalah bahwa penyelenggaraan JPH dilakukan dengan berorientasi pada tujuan yang tepat guna dan berdaya guna serta meminimalisasi penggunaan sumber daya yang dilakukan dengan cara cepat, sederhana, dan biaya ringan atau terjangkau.
6. Asas profesionalitas adalah bahwa penyelenggaraan JPH dilakukan dengan mengutamakan keahlian yang berdasarkan kompetensi dan kode etik.¹⁰

Regulasi tentang sertifikasi halal yang terdapat dalam UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, telah memberikan kejelasan perlindungan bagi konsumen khususnya konsumen muslim. Peredaran produk-produk pangan yang sebelum diterbitkan undang-undang ini hanya bersifat sukarela tetapi setelah diterbitkan Undang-undang No. 33 tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal maka diwajibkan bagi setiap pelaku usaha untuk mendaftarkan produknya yang dipastikan dengan sertifikasi halal.

4. Instruksi Presiden RI Nomor 2 Tahun 1991 Tentang Peningkatan Pembinaan Dan Pengawasan Produksi dan Peredaran Makanan Olahan

¹⁰*Ibid*, h. 8-9.

Melalui Instruksi Presiden (Inpres) No 2 tahun 1991 yang terbit tanggal 12 Juni 1991, Presiden menginstruksikan kepada lima instruksi kepada menteri-menteri terkait. Di dalam butir pertama disebutkan bahwa pembinaan dan pengawasan produksi dan peredaran makanan olahan dilakukan oleh Menteri Kesehatan, Menteri Perindustrian, menteri Pertanian, dan Menteri Perdagangan di bawah Kordinasi Menko Kestra. Kemudian dalam butir ketiga ditegaskan bahwa sebagai implementasi dari butir pertama tersebut instansi-instansi yang terkait membuat peraturan-peraturan sesuai dengan kewenangannya masing-masing yang dapat menjamin pemilihan bahan, pengolahan, pengemasan, pelabelan serta pemasaran harus benar-benar memenuhi persyaratan mutu. Kesehatan, keselamatan, dan kejelasan kepada masyarakat dalam menentukan pilihan sesuai dengan 'keyakinan agamanya'.¹¹

Selanjutnya, agar konsumen terhindar dari pangan yang haram maka mereka harus mendapat penyuluhan yang memadai tentang pangan yang halal dan pangan yang haram sehingga mereka dapat memilih pangan yang benar. Pilihan yang disertai tugas untuk memberika penyuluhan tersebut adalah Menteri Agama.¹²

Sampai saat ini, secara umum kelanjutan dari instruksi Presiden tersebut belum terlihat secara nyata penerapannya baik di kalangan industri atau

¹¹Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan kosmetika Majelis Ulama Indonesia, *Panduan Umum Sistem Jaminan Halal LP POM-MUI*, (Jakarta: DEPAG RI, 2008), h. 8.

¹²*Ibid*

instansi berwenang yang mempunyai kekuatan hukum Dalam rangka mensukseskan pelaksanaan labelisasi halal dan instruksi Presiden No. 2 tahun 1991 untuk melindungi segenap konsumen Muslim di Indonesia dan meningkatkan keunggulan kompetitif produk ekspor Indonesia terutama makanan halal untuk pasar global, maka perlu dibentuk suatu lembaga sertifikasi yang profesional dan transparan¹³

2. Akibat Hukum Bagi Pelaku Usaha Atas Produk Pangan Yang Tidak Bersertifikat Halal

1. Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, salah satu hak konsumen adalah berhak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa. Terjadinya perbuatan-perbuatan yang berakibat merugikan konsumen akibat penggunaan barang dan/atau jasa harus dihindari. Seperti perbuatan mencantumkan label halal pada produk pangan yang tidak sah.

Perangkat hukum yang melindungi konsumen tidak dimaksudkan untuk mematikan usaha pelaku usaha, tetapi justru sebaliknya perlindungan konsumen dapat mendorong iklim berusaha yang sehat yang mendorong lahirnya perusahaan yang tangguh dalam menghadapi persaingan melalui penyediaan barang dan/atau jasa yang berkualitas. Oleh karena itu dalam

¹³Asep dan Mustolih “Argumentasi Hukum Jaminan Produk Halal”, *Jurnal Bimas Islam*, (UIN Jakarta, 2015), Vol : II No.3, h. 48-49.

ketentuan Bab IV UUPK Pasal 8 sampai dengan 17 menyebutkan perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha.

Sertifikasi merupakan suatu kegiatan pengujian secara sistematis untuk mengetahui apakah suatu barang yang diproduksi suatu perusahaan telah memenuhi ketentuan halal atau belum. Hasil dari kegiatan sertifikasi halal adalah terbitnya sertifikat halal yang menandakan bahwa produk tersebut telah memenuhi kaidah kehalalan. Output dari terbitnya sertifikat halal adalah dicantumkan nya label halal di produk yang di produksi dalam bentuk kemasan.

Terkait dengan kehalalan suatu produk, Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen telah memberikan perlindungan bagi umat Muslim. Dalam Pasal 8 ayat (1) huruf h UUPK diatur bahwa “pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan “halal” yang dicantumkan dalam label”. Setiap pelaku usaha yang tidak mengikuti ketentuan-ketentuan dalam Pasal 8 ayat (1) pada Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen diancam dengan penuntutan pidana yang terdapat dalam Pasal 62 ayat (1) yaitu Pelaku Usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, Pasal 1 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf c, ayat (2), dan Pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) Tahun atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua

miliar rupiah). Terhadap pelanggaran yang mengakibatkan luka berat, sakit berat, cacat tetap atau kematian diberlakukan ketentuan pidana yang berlaku.¹⁴ Terhadap sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62, dapat dijatuhkan hukuman tambahan, berupa:¹⁵

- a. Perampasan barang tertentu;
- b. Pengumuman keputusan hakim;
- c. Pembayaran ganti rugi;
- d. Perintah penghentian kegiatan tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian konsumen;
- e. Kewajiban penarikan barang dari peredaran; atau
- f. Pencabutan izin usaha.

Hukum perlindungan konsumen dalam implementasi harus memiliki kekuatan mengikat bagi produsen dalam memproduksi barang dan/jasa dan memberikan kepastian bagi konsumen bahwa produk pangan yang beredar telah memenuhi kualitas yang baik dan halal. Undang-undang harus berlaku efektif dalam masyarakat, tetapi karena pengaturan sertifikasi halal dan label halal yang bersifat sukarela (*voluntary*), artinya Undang-undang Perlindungan Konsumen tersebut belum memberikan jaminan utuh bagi konsumen muslim dalam mengkonsumsi produk pangan berupa makanan dan minuman.

2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan

¹⁴*Ibid*

¹⁵*Ibid*

Keterangan halal untuk suatu produk pangan sangat penting bagi masyarakat Indonesia yang mayoritas memeluk agama Islam, pemerintah mengatur mengenai label produk halal melalui Undang-undang No. 18 Tahun 2012 Tentang Pangan. Pasal 97 ayat (1) menjelaskan bahwa setiap orang yang memproduksi pangan di dalam negeri untuk diperdagangkan wajib mencantumkan label di dalam dan/atau pada Kemasan Pangan, selanjutnya di ayat ayat (2) disebutkan setiap orang yang mengimpor pangan untuk diperdagangkan wajib mencantumkan label di dalam dan/ atau pada Kemasan Pangan pada saat memasuki wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pada ayat (3) diatur tentang pencantuman label di dalam dan/ atau pada Kemasan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditulis atau dicetak jangan menggunakan bahasa Indonesia serta memuat paling sedikit keterangan mengenai: nama produk, daftar bahan yang digunakan, berat bersih atau isi bersih, nama dan alamat pihak yang memproduksi atau mengimpor, halal bagi yang dipersyaratkan, tanggal dan kode produksi, tanggal, bulan, dan tahun kadaluwarsa, nomor izin edar bagi pangan olahan dan asal usul bahan pangan tertentu. Keterangan tentang kehalalan pangan tersebut tersebut dimaksudkan untuk melindungi masyarakat khususnya yang beragama Islam agar terhindar dari mengonsumsi pangan yang tidak halal (haram). Kebenaran suatu pernyataan halal pada label pangan tidak hanya dibuktikan dari segi bahan baku, bahan tambahan pangan, atau bahan bantu

yang digunakan dalam memproduksi pangan tetapi harus pula dapat dibuktikan dalam proses produksinya.

Ketentuan pidana dalam UU pangan terkait label diatur dalam Pasal 143 dan Pasal 144. Pasal 143 mengatur bahwa “setiap orang yang dengan sengaja menghapus, mencabut, menutup, mengganti label, melabel kembali dan/atau menukar tanggal, dan Tahun kadaluarsa pangan yang diedarkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) Tahun atau denda paling banyak Rp. 4.000.000.000,00 (Empat Milyar Rupiah)”.

Selanjutnya pada Pasal 144 mengatur bahwa “Setiap orang dengan sengaja memberikan keterangan atau persyaratan yang tidak benar atau menyesatkan pada label sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (2) di Pidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) Tahun atau denda paling banyak Rp. 6.000.000.000,00 (Enam Milyar Rupiah)”.

Segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang bertujuan melindungi konsumen yang telah ada pada saat Undang-undang ini diundangkan, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak diatur secara khusus dan/atau tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-undang ini.¹⁶

¹⁶Asri, “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Produk Pangan Yang Tidak Bersertifikat Halal”, *Jurnal Kajian Hukum dan Keadilan*, Op.cit, vol IV, h. 12-13.

3. Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal

Tentang Jaminan Produk Halal (JPH) Peraturan perundang-undangan terkait produk halal yang ada sebelumnya belum satu pendapat mengenai sifat Sertifikasi Halal. Pengaturannya bertentangan satu sama lain, misalnya pengaturan dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen mengatur bahwa Sertifikasi Halal bersifat kebolehan (*voluntary*), Undang-undang tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan tahun 2014 Pasal 58 ayat 4 menyatakan bahwa peraturan perundang-undangan terkait produk halal yang ada sebelumnya belum satu pendapat mengenai sifat Sertifikasi Halal. Pengaturannya bertentangan satu sama lain, misalnya pengaturan dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen mengatur bahwa Sertifikasi Halal bersifat kebolehan (*voluntary*), Undang-undang tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan tahun 2014 Pasal 58 ayat 4 menyatakan bahwa “produk hewan yang diproduksi di dan/ atau dimasukkan ke wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk diedarkan wajib disertai : a. Sertifikat veteriner, dan b. Sertifikat halal bagi produk yang dipersyaratkan.” Pengaturan tersebut sejalan dengan pengaturan sertifikasi halal dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan yang menyatakan Sertifikasi Halal bersifat wajib apabila dipersyaratkan (*mandatory if required*).

Hal yang lebih tegas tentang sertifikasi halal diatur dalam UU Nomor 33 Tahun 2014 tentang JPH Pasal 4 menyatakan secara jelas bahwa “Produk yang masuk, beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib

bersertifikat Halal”. “Kewajiban bersertifikat halal bagi produk yang beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia sebagaimana dimaksud di atas mulai berlaku 5 (lima) Tahun terhitung sejak Undang-undang ini diundangkan”.¹⁷

Produk yang masuk, beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal artinya bahwa sertifikat halal bersifat wajib (*mandatory*) bagi importir maupun pelaku usaha yang ada di dalam negeri, jadi hanya 2 (dua) jenis produk yang beredar di Indonesia nantinya, yakni produk Halal dan Produk Non Halal. Pelaku usaha yang memproduksi produk dari bahan yang berasal dari bahan yang diharamkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan Pasal 20 dikecualikan dari mengajukan permohonan sertifikat halal.¹⁸ Pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mencantumkan keterangan tidak halal pada produk.¹⁹ Terkait yang dimaksud dengan “keterangan tidak halal” adalah pernyataan tidak halal yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari produk. Keterangan dapat berupa gambar, tanda, dan/atau tulisan.²⁰

Prioritas wajib sertifikat halal adalah untuk makanan, kemudian baru obat dan kosmetika. Pelaku usaha yang telah memperoleh sertifikat halal wajib : *Pertama*, mencantumkan label halal terhadap produk yang telah

¹⁷ *Ibid*

¹⁸ *Ibid*

¹⁹ *Ibid*

²⁰ *Ibid*

mendapat sertifikat halal; *Kedua*, menjaga kehalalan produk yang telah memperoleh sertifikat halal, *Ketiga*, memisahkan lokasi, tempat dan penyembelian, alat pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan dan penyajian antara produk halal dan tidak halal; *keempat*, memperbaharui sertifikat halal jika masa berlaku sertifikat halal berakhir dan *Kelima*, melaporkan perubahan komposisi bahan kepada BPJPH (Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal).

Pelaku usaha yang telah memperoleh sertifikat Halal wajib mencantumkan Label Halal pada kemasan produk, bagian tertentu dari produk dan/atau tempat tertentu pada produk. Produk yang tidak bersertifikat halal tidak boleh beredar kecuali pelaku usaha yang memproduksi bahan yang berasal dari bahan yang diharamkan dikecualikan dari pengajuan sertifikat.

Sertifikasi halal bersifat wajib, maka produk pangan yang beredar terdiri dari dua kategori: pertama, pelaku usaha yang mengurus sertifikasi halal melalui pengajuan permohonan untuk melakukan pengurusan sertifikat halal dan yang memperbaharui sertifikasi halal jika masa berlakunya berakhir. Maka berhak menggunakan label halal dan harus dicantumkan dalam kemasan produk. Kedua, Pelaku usaha yang tidak melakukan pengajuan permohonan sertifikasi halal terhadap produknya, maka produk yang dihasilkannya tidak bersertifikat halal dan tidak boleh mencantumkan label halal dalam kemasan produknya. Jika ada pencantuman label halal maka label yang digunakan adalah tidak sah.

Terhadap pelaku usaha yang tidak melakukan kewajiban bagi pelaku usaha yang telah memperoleh sertifikat halal sebagaimana yang tercantum pada Pasal 25 UU JPH maka dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis, denda administratif atau pencabutan sertifikat halal dan juga bagi pelaku usaha yang tidak melakukan kewajiban dalam memproduksi produk dari bahan yang berasal dari barang yang diamankan sesuai Pasal 26 dikenakan sanksi administratif berupa teguran lisan, teguran tertulis atau denda administratif.

Selain ketentuan berupa denda yang bersifat administratif di UU JPH ini juga mengatur ketentuan pidana bagi pelaku usaha yang tercantum dalam Pasal 56 yaitu “Pelaku usaha yang tidak menjaga kehalalan produk yang telah memperoleh sertifikat halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) Tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua Milyar rupiah)”.

Untuk menjamin kerahasiaan formula yang diajukan oleh pelaku usaha yang melakukan mengajukan sertifikasi halal di atur dalam Pasal 43 UU JPH, Setiap orang yang terlibat dalam penyelenggaraan proses JPH wajib menjaga kerahasiaan formula yang tercantum dalam informasi yang diserahkan oleh pelaku usaha. Apabila melanggar maka pelaku dipidana penjara paling lama 2 (dua) Tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 2.000.000.000 (dua Milyar rupiah).

Untuk menjaga kehalalan produk dan menjamin konsumen muslim dan warga negara Indonesia untuk mengkonsumsi produk pangan yang baik dan halal maka penegakan hukum akan menimbulkan efek jera bagi pelaku usaha. Secara tegas Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal terhadap pelanggarannya, maka ditetapkan dua sanksi yaitu sanksi administratif dan sanksi pidana.²¹

B. Konsep Islam Tentang Makanan dan Minumam Halal

1. Pengertian dan Dasar Hukum Makanan Halal

Secara etimologi makanan adalah memasukkan sesuatu melalui mulut.²² Dalam bahasa arab makanan berasal dari kata *at-ta'am* (الطعام) dan jamaknya *al-atimah* (الأيمة) yang artinya makan-makanan.²³ Sedangkan dalam ensiklopedi hukum Islam yaitu segala sesuatu yang dimakan oleh manusia, sesuatu yang menghilangkan lapar.²⁴ Halal berasal dari bahasa arab (الحلال) yang artinya membebaskan, memecahkan, membubarkan dan membolehkan.²⁵

Sedangkan dalam ensiklopedi hukum Islam yaitu segala sesuatu yang menyebabkan seseorang tidak dihukum jika menggunakannya, atau sesuatu yang boleh dikerjakan menurut syara'.²⁶

²¹*Ibid*, h. 14-15

²²Proyek Perguruan Tinggi Agama /IAIN di Pusat Direktorat Pembinaan Perguruan Tinggi Agama Islam, *Ilmu Fiqih*, (Jakarta, 1982), h.525.

²³Adib Bisri dan munawwir AF; *Kamus Indonesia Arab*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 1999), h. 2013.

²⁴ Yazid Abu Fida', *Ensiklopedi Halal Haram Makanan*, (Solo: Pustaka Arafah, 2004), h. 2

²⁵ Ahsin W. Al- Hafidz, *Fikih Kesehatan*, (Jakarta: Amzah, Cet. Ke-1, 2007), h. 165

Sedangkan menurut buku petunjuk teknis sistem produksi halal yang diterbitkan oleh DEPAG menyebutkan bahwa makanan adalah barang yang dimaksudkan untuk dimakan atau diminum oleh manusia, serta bahan yang digunakan dalam produksi makanan dan minuman. Sedangkan halal adalah: sesuatu yang boleh menurut ajaran Islam.²⁷

Jadi pada intinya makanan halal adalah: makanan yang baik yang dibolehkan memakannya menurut ajaran Islam, yaitu sesuai dalam Al-Qur'an dan Al-hadits. Sedangkan pengertian makanan yang baik yaitu segala makanan yang dapat membawa kesehatan bagi tubuh, dapat menimbulkan nafsu makan dan tidak ada larangan dalam Al-Qur'an maupun hadits. Tetapi dalam hal yang lain diperlukan keterangan yang lebih jelas berdasarkan *ijma'* dan *Qiyas* (*ra'yi/ijtihad*) terhadap sesuatu nash yang sifatnya umum yang harus digali oleh ulama agar kemudian tidak menimbulkan hukum yang *syubhat* (menimbulkan keragu-raguan) dan para ulama telah *ijma'* tentang halalnya binatang-binatang ternak seperti unta, sapi, dan kambing serta diharamkannya segala sesuatu yang bisa menimbulkan bahaya baik dalam bentuk keracunan, timbulnya penyakit atau adanya efek sampingan (*side-effect*). Dengan demikian sebagian ulama' memberikan keterangan tentang hukum-hukum makanan dan minuman.²⁸

²⁶ Yazid Abu Firda, *Loc.cit*, h. 2

²⁷ Bagian proyek sarana dan prasarana produk halal direktorat Jenderal bimbingan masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, *Petunjuk teknis pedoman sistem produksi halal*, *Op.cit*, h. 3.

²⁸ Hussein Bahresy, *Pedoman Fiqh Islam*, (Surabaya: Al-Ikhlash, 1981), h. 303.

2. Dasar Hukum Makanan Halal

Prinsip pertama yang ditetapkan Islam, pada asalnya : segala sesuatu yang diciptakan Allah itu halal tidak ada yang haram, kecuali jika ada *nash* (dalil) yang *shahih* (tidak cacat periwayatannya) dan *sharih* (jelas maknanya) yang mengharamkannya.²⁹ Sebagaimana dalam sebuah kaidah fikih :

لأَصْلُ الْأَشْيَاءِ الْإِبَاحَةُ حَتَّى يَدُلَّ الدَّلِيلُ عَلَى تَحْرِيمِهَا

Artinya : *Pada asalnya, segala sesuatu itu mubah (boleh) sebelum ada dalil yang mengharamkannya.*³⁰

Para ulama, dalam menetapkan prinsip bahwa segala sesuatu asal hukumnya boleh, merujuk pada beberapa ayat dalam al Qur'an :

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ أَسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ
فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya : *Dialah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu dan Dia berkehendak (menciptakan) langit, lalu dijadikan-Nya tujuh langit. Dan Dia Maha Mengetahui segala sesuatu* (QS. Al-Baqarah : 29)³¹

Dari sinilah maka wilayah keharaman dalam syariat Islam sesungguhnya sangatlah sempit, sebaliknya wilayah kehalalan terbentang sangat luas, jadi selama segala sesuatu belum ada *nash* yang mengharamkan atau menghalalkannya, akan kembali pada hukum asalnya, yaitu boleh yang berada di wilayah kemaafan Tuhan.

²⁹ Yusuf Qardhawi, *Halal Haram Dalam Islam*, (Solo: Era Intermedia, 2003), h. 36.

³⁰ Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Semarang: Dina Utama, cet.1, 1994), h. 127.

³¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Semarang: CV Asy Syifa, 2001), h. 11.

Dalam hal makanan, ada yang berasal dari binatang dan ada pula yang berasal dari tumbuh-tumbuhan. Ada binatang darat dan ada pula binatang laut. Ada binatang suci yang boleh dimakan dan ada pula binatang najis dan keji yang terlarang memakannya. Demikian juga makanan yang berasal dari bahan-bahan tumbuhan. Untuk seterusnya marilah kita mempelajari keterangan dari Al-Qur'an dan Hadits yang menyatakan makanan dan minuman yang halal dan yang haram dan kesimpulan hukum yang diambil dari pada keduanya.³²

Kepedulian Allah SWT sangat besar terhadap soal makanan dan aktifitas makan untuk makhluknya. Hal ini tercermin dari firmanNya dalam Al-Qur'an mengenai kata *tha'am* yang berarti makanan yang terulang sebanyak 48 kali dalam berbagai bentuknya. Ditambah pula dengan kata *akala* yang berarti makan sebagai kata kerja yang tertulis sebanyak 109 kali dalam berbagai derivasinya, termasuk perintah makanlah sebanyak 27 kali. Sedangkan kegiatan yang berhubungan dengan makan yaitu minum yang dalam bahasa Al-Qur'an disebut *syariba* terulang sebanyak 39 kali.³³

Betapa pentingnya makanan untuk kehidupan manusia, maka Allah Swt mengatur bahwa aktifitas makan selalu diikuti dengan rasa nikmat dan puas, sehingga manusia sering lupa bahwa makan itu bertujuan untuk kelangsungan hidup dan bukan sebaliknya hidup untuk makan.

³² H.M.K. Bakri, *Hukum Pidana Dalam Islam*, (Solo: Ramadhani), h. 143.

³³ Tiench Tirta winata, *Makanan Dalam Perspektif Al Qur'an Dan Ilmu Gizi* Jakarta: Balai Penerbit FKUI, 2006), h.1

Pada dasarnya semua makanan dan minuman yang berasal dari tumbuh-tumbuhan sayur-sayuran, buah-buahan dan hewan adalah halal kecuali yang beracun dan membahayakan nyawa manusia.³⁴ Dasar hukum Al- Qur'an tentang makanan halal diantaranya yaitu :

وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ

Artinya : *“Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah rizkikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepadaNya”*. QS. Al- Mai'dah : 88)³⁵

Juga dalam surat An- Nahl ayat 114 :

فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ إِنَّ كُفْرَكُمْ إِيَّاهُ

Artinya : *Makanlah yang halal lagi baik dari rezki yang telah diberikan Allah kepadamu; dan syukurilah nikmat Allah, jika kamu hanya kepadaNya menyembah*. (QS. An-Nahl : 114).³⁶

Sebenarnya Dalam Al Qur'an makanan yang di haramkan pada pokoknya hanya ada empat yaitu dalam surat Al-Baqarah ayat 173.

نَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخَنزِيرِ وَمَا أُهْلَ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ

فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Artinya *“Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang ketika*

³⁴ Bagian proyek sarana dan prasarana produk halal, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, *Petunjuk Teknis Pedoman Sistem Produksi Halal*, Op.cit, h. 7.

³⁵ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, Op.cit. h. 256.

³⁶ *Ibid*, h. 598.

disembelih) disebut (nama) selain Allah. Akan tetapi, barang siapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang ia tidak menginginkannya, tidak (pula) melampaui batas, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang” (QS. Al-Baqarah {2} : 173).³⁷

Dalam ayat ini telah dijelaskan bahwa makanan yang diharamkan

diantaranya :

1. Bangkai, yang termasuk kategori bangkai adalah hewan yang mati dengan tidak disembelih ; termasuk didalamnya hewan yang mati tercekik, dipukul, jatuh, ditanduk dan diterkam oleh hewan buas, kecuali yang sempat kita menyembelihnya, hanya bangkai ikan dan belalang saja yang boleh kita makan.
2. Darah, sering pula diistilahkan dengan darah yang mengalir, maksudnya adalah darah yang keluar pada waktu penyembelihan (mengalir) sedangkan darah yang tersisa setelah penyembelihan yang ada pada daging setelah dibersihkan dibolehkan. Dua macam darah yang dibolehkan yaitu jantung dan limpa.
3. Babi, apapun yang berasal dari babi hukumnya haram baik darahnya, dagingnya, maupun tulangnya.
4. Binatang yang ketika disembelih menyebut selain nama Allah.

Jadi dapat disimpulkan bahwa syarat-syarat produk pangan halal menurut syariat Islam adalah:

³⁷*Ibid.* h. 57.

- a. Halal dzatnya
- b. Halal cara memperolehnya
- c. Halal dalam memprosesnya
- d. Halal dalam penyimpanannya
- e. Halal dalam pengangkutannya
- f. Halal dalam penyajiannya.³⁸

3. Syarat dan Kriteria Makanan Halal Menurut Islam

Dalam hal makanan sebenarnya ada dua pengertian yang bisa kita kategorikan kehalalannya yaitu halal dalam mendapatkannya dan halal dzat atau substansi barangnya. Halal dalam mendapatkannya maksudnya adalah benar dalam mencari dan memperolehnya. Tidak dengan cara yang haram dan tidak pula dengan cara yang batil. Jadi, makanan yang pada dasar dzatnya halal namun cara memperolehnya dengan jalan haram seperti; mencuri, hasil korupsi dan perbuatan haram lainnya, maka secara otomatis berubah status hukumnya menjadi makanan haram. Namun penelitian ini hanya akan membahas tentang makanan halal dari segi dzatnya atau substansi barangnya.

Makanan dan minuman halal secara *dzatiah* (substansi barangnya), menurut Sayyid Sabiq dibagi dalam dua kategori, yaitu *jamad* (benda mati) dan *hayawan* (binatang).³⁹

³⁸Bagian proyek sarana dan prasarana produk halal, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, *Tanya Jawab Seputar Poduki Halal*, (Jakarta: DEPAG RI, 2003), h. 17.

³⁹ Thobieb Al-asyhar, *Bahaya Makanan Haram Bagi Kesehatan Jasmani dan Rohani*, (Jakarta: Al-Mawardi Prima, cet.1, 2003), h.125.

Yang termasuk makanan dan minuman yang halal adalah :

1. Bukan terdiri dari atau mengandung bagian atau benda dari binatang yang dilarang oleh ajaran Islam untuk memakannya atau yang tidak disembelih menurut ajaran Islam.
2. Tidak mengandung sesuatu yang digolongkan sebagai najis menurut ajaran Islam.
3. Dalam proses, menyimpan dan menghidangkan tidak bersentuhan atau berdekatan dengan makanan yang tidak memenuhi persyaratan sebagai mana huruf a, b, c, dan d di atas atau benda yang dihukumkan sebagai najis menurut ajaran Islam.⁴⁰

Berikut ini agar lebih jelasnya akan dipaparkan kriteria kehalalan bahan :

Tabel 1.1 : Kriteria Bahan Makanan Halal

HALAL	MASYBUH (MERAGUKAN)	HARAM
ADDITIF (Zat Makanan) :	ADDITIF (Zat Makanan) :	AADDITIF (Zat Makanan)
1. Alami : gula, garam, madu, asam lemak, cuka, asam sitrun, lada hitam, mustrad. 2. Sintetis : Sodium bikarbonat, kalsium klorida, kalsium silikat, silicon dioksida, sodium benzoat, sodium citrat, asam anggur.	1. ragi bir (AL) 2. sodium nitrat. Nitrit (AK) 3. Asam fosfor (AK) 4. Alanine (AB)	1. sakarin (AK) 2. sodium (AK) 3. Nitrat (AK) 4. Nitrit (AK)
Agar	Pemanis buatan	Alkohol

⁴⁰ Bagian proyek sarana dan prasarana produk halal direktorat Jenderal bimbingan masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, *Petunjuk Teknis Pedoman Sistem Produksi Halal*, Op.cit, h. 8.

Alanine (AT)	Minuman ringan	Minuman beralkohol
Amilose	BHA, BHT (Anti oksidan pencegah pembusukan)	Pemanis buatan (Siklomaat, sakarin, aspartam)
Anti oxidant (vitamin C dan enzim)	Garam Empedu (AB) Memperlambat proses pembusukan	Bacon (babi bakar) bakon bits
Pemanis buatan (sorbitol, mannitol)	Biotin (AB)	Darah
Avidin (enzim protein dalam telur mentah)	Karbohidrat (AB)	Kokain(AK)
Baking soda (soda roti)	Khelat (AB)	Kodein
Benzote (asam benzoat)	Kolesterol (AB)	Kolagen (dari babi)
Bran (sekam)	Kopi (AK)	Ekstrak pewarna sintetis (AK)
Butyric Acid (lemak Susu)	Ekstrak Pewarna (AK)	Bangkai
Karbo Hidrat (AT)	Kobalamin (AB) Vitamin B12	DES (Hormon Sex Betina)
Calciferol (Vitamin D)	Sistin (AB) Memperlambat oksidasi pada makanan	Etilena Oksida (Gas pembunuh Serangga dan mikroorganisme dalam makanan kering)
Carotenoid (Sari Wrotel)	Digleserid (AB)	Fermentasi Sari Tepung (AL)
Karragin)Ekstrak lumut Irlandia untuk bahan gel)	Diuretik (AK)	Gelatin (Babi)
Ergosterol (Penyusunan Vitamin D)	Edta (AK)	HAM (dari Babi)
Farina (tepung kasar careal)	Emusilfer (AB) Penuntun tegangan permukaan lemak	LARD(babi jantan kebiri)
Ficin (Enzim pelembut daging)	Enzim-Enzim (AB)	Lempengan Lemak Babi sebagai Perenyah Makanan)
Asam lemak (AT)	Asam lemak (AB)	Daging binatang buas dan bertaring (AB)
Fiber (Serat)	Ekstrak Penyedap Rasa (AK)	Pepsin (dari Babi)

Asam Folat (AT)	Asam Folat (AB) Penambah arah	Daging Babi Shortening (AB) Bumbu masak
Fruktosa (Gula Susu)	Gelatin (AB)	Ekstrak Vanila (AL)
Gelatin (dari rumput atau tulang iga sapi)	Gliserid (AB)	Ekstrak Vanili (AL)
Giladin (Gluten Lendir Padi)	Gliserol (AB)	Kapsul Vitamin (AB) Vitamin A,E,Konsumen
Glukosa (Dekstosal)	Glikogen (AB)	Anggur Perasan
Gliserid (AT)	Histamin (anti alergi)	
Gumis (pengental Makanan)	Hormon-hormon (AB)	
Minyak Beku (Mentega)	Inosito(AB)	
Inosital (AT)	Keratin (AB) Protein pada rambut	
Inulin (gula buah dari tanaman tertentu)	Limit Dextrin (AB)	
Iodin	Lemak (AB)	
Asam susu	Mono Gliserid (AB)	
Laktosa (Gula Susu)	Niasin (AB) asam niacinamid sebagai penyedap rasa	
Lanolin (Lemak Bulu Domba Wool)	Oleic Acid (asam nabati)	
Lechitin (Pengdmulsi lemak dalam makanan)		
Lemak (AT)		
Lysin (Asam Amino protein dalam padi padian)		
Malt (Sari Tepung)		
Maltose (sulingan air tebu)		
Mono Gliserid (AT)		
Monosakarida		
Oleic Acid (AT) Asam Minyak		
Pasteurisasi (Pemanasan untuk membunuh		

mikroorganisme)		
Asam Pantotematik Vitamin Bintang Kompleks		
Papain (Sari Pepaya)		
Asam Benzoat paramin (PABA) vitamin B kompleks		
Pecitin (AT) Getah buah-buahan		
Polisakarida (AT)		
Asam lemak Tak Jenuh (AT)		
Propionic Acids, Asam Keringat (Getah Pohon)		
Rennet (AT Mikroba)		
Rennin (AT Mikroba)		
Riboflavin (AT) Vitamin B2		
Roughage (ampas)		
Shortening (AT) Bumbu Masak		
Sorbitol (Alkohol Gula dalam buah-buahan)		
Starch (karbohidrat/ pati padi-padian)		
Zat Perangsang (AT)		
Sukrosa / Gula biasa (Murni)		
Suet (lemak utuh sapi/domba)		
Pemanis Alami		
Tallow (Lemak dari jaringan lemak binatang ternak selain babi)		
Asam Tannin (cuka amak/semir kulit)		
Thiamin(AT) vitamin B kompleks		
Tonic (tanpa alkohol)		

Obat kuat		
Tapioka (tepung jagung)		
Trypsin (bukan dari babi)		
Vanila		
Vanilin Acid (Asam Vanila)		
Vanili		
Cuka		
Tablet Vitamin (A,D,E,C)		
Zein (Protein Jagung)		

Sumber : Buku “*menyingkap Produk-Produk Haram (berbagai Keracunan dan kenyataan)*” Oleh Ahmad Hussein Sakr

Keterangan :

AB : Berasal dari Binatang

AL : Alkohol

AK : Alasan Kesehatan

AT : Berasal dari Tumbuhan



4. Fatwa Majelis Ulama Indonesia Tentang Produk Halal

Berdasarkan Fatwa Majelis Ulama Indonesia No. 4 Tahun 2003 tentang Standarisasi Fatwa Halal Menetapkan beberapa ketentuan yang berkaitan dengan produk halal diantaranya :⁴¹

Pertama : Khamar

1. Khamar adalah setiap yang memabukan. Baik berupa minuman, makanan maupun lainnya. Hukumnya adalah haram.
2. Minuman yang termasuk dalam kategori khamar adalah minuman yang mengandung etanol (C_2H_5OH) minimal 1%.
3. minuman yang termasuk khamar adalah najis.
4. Minuman yang mengandung etanol dibawah 1% sebagai hasil fermentasi yang direkayasa adalah haram atas dasar دريعة (*Preventif*), tetapi tidak najis.
5. Minuman keras yang dibuat dari air perasan tape dengan kandungan etanol minimal 1% termasuk kategori khamar.
6. Tape dan air tape tidak termasuk khamar, kecuali apabila memabukan.

Kedua : Etanol, *Fusel Oil*, Ragi dan Cuka

1. Etanol yang merupakan senyawa murni yang bukan berasal dari industri khamar adalah suci.

⁴¹ Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa MUI Bidang POM dan IPTEK*. h. 798

2. Penggunaan etanol yang merupakan senyawa murni yang bukan berasal dari industri khamar untuk proses produksi industri pangan hukumnya.
3. Mubah, apabila dalam hasil produk akhirnya tidak terdeteksi.
4. Haram, apabila dalam hasil produk akhirny masih terdeteksi.
5. Penggunaan etanol yang merupakan senyawa murni yang berasal dari industri khamar untuk proses produksi industri hukumnya haram.
6. *Fusel Oil* yang bukan berasal dari khamar adalah halal dan suci.
7. *Fasel oil* yang berasal dari khamar adalaj haram dan najis.
8. Komponen yang dipisahkan secara fisik dari *fusel oil* yang berasal dari khamar adalah haram.
9. Komponen yang dipisahkan secara fisik dari *Fosil oil* yang berasal dari khamar dan direaksikan secara kimiawi sehingga berubah menjadi senyawa baru hukumnya halal dan suci ().
10. Cuka yang berasal dari khamar baik terjadi dengan sendirinya maupun melalui rekayasa, hukumnya halal dan suci.
11. Ragi yang dipisahkan dari proses pembuatan khamar setelah dicuci hingga rasa, bau dan warna khamarnya, hukumnya halal dan suci.

Ketiga : Pemotongan Hewan

1. Yang boleh menyembelih hewan adalah orang yang beragama Islam dan *akil balig*.
2. Cara menyembelih adalah sah apabila dilakukan dengan :

- a. Membaca “*basmalah*” saat menyembelih;
- b. Menggunakan alat pemotong yang tajam;
3. Memotong sekaligus sampai putus saluran pernafasan/tenggorkan (*hulqum*). Saluran makanan (*mari'*) dan kedua urat nadi (*wadajain*) ; dan
4. Pada saat pemotongan pemingsanan hewan (*stunning*) hukumnya boleh dengan syarat tidak menyakiti hewan yang bersangkutan dan sesudah di-stunning statusnya masih hidup (*hayat mustaqirrah*)
5. Pemingsanan secara mekanik, dengan listrik, secara kimiawi ataupun cara lain yang dianggap menyakiti hewan, hukumnya tidak boleh.

Keempat : Masalah Penggunaan nama dan Bahan

1. Tidak boleh mengkonsumsi dan menggunakan nama dan/atau simbol-simbol makanan/minuman yang mengarah kepada kekufuran dan kebatilan.
2. Tidak boleh mengkonsumsi dan menggunakan nama/atau simol-simbol makanan/minuman yang mengarah kepada nama-nama benda/binatang yang diharamkan terutama babi dan khamar, kecuali yang telah mentradisi (*'urf*) dan dipastikan tidak mengandung unsur-unsur yang diharamkan seperti nama bakso, bakmi, bakwan, bakpia dan bakpao.
3. Tidak boleh mengkonsumsi dan menggunakan bahan campuran bagi komponen makanan/minuman yang menimbulkan asa/aoma (*flavour*) benda-benda atau binatang yang diharamkan, seperti mie instan rasa babi, *bacon flavour*, dll.

4. Tidak boleh mengonsumsi makanan/minuman yang menggunakan nama-nama makanan/minuman yang diharamkan seperti *whisky*, *brandy*, *beer*, dll.
- 5.

Kelima : Media Pertumbuhan

1. Mikroba yang tumbuh dan berasal dari media pertumbuhan yang suci dan halal adalah halal, dan mikroba yang tumbuh dan berasal dari media pertumbuhan yang najis dan haram adalah haram.
2. Produk mikrobial yang langsung dikonsumsi yang menggunakan bahan-bahan yang haram dan najis dalam media pertumbuhan. Baik pada skala penyegaran, skala pilot plant, dan tahap produksi, hukumnya haram.
3. Produk mikrobial yang digunakan untuk membantu proses produksi produk lain yang langsung dikonsumsi dan menggunakan bahan-bahan haram dan najis dalam media pertumbuhannya hukumnya haram.
4. Produk konsumsi yang menggunakan produk mikrobial harus ditelusuri kehalalannya sampai pada tahap proses penyegaran mikroba.

Keenam : Masalah kodok

Yang menjadi pertimbangan dalam masalah kodok adalah faktor lingkungan. Nabi Muhammad SAW Melarang membunuh kodok, jadi haram membunuh dan memakan kodok.

Ketujuh : Masalah Lain-lain

1. Masalah sertifikasi halal yang kadaluwarsa :

- a. Untuk daging impor, batasannya adalah per pengapakan (*shipment*) sepanjang tidak rusak. Untuk daging lokal, batasannya maksimal 6 bulan.
 - b. Untuk *flavour* impor dan lokal, batasannya maksimal satu tahun
 - c. Untuk bahan-bahan lainnya baik impor maupun lokal, batasannya maksimal 6 bulan.
1. Masalah lembaga sertifikasi halal luar negeri perlu ada standar akreditasi dalam hal SOP dan fatwanya. Jika diragukan kebenarannya, harus diteliti ulang.
 2. Masalah mencuci bekas babi/anjing :
 - a. Caranya di-*sertu* (dicuci dengan air 7x yang salah satunya dengan tanah/debu atau penggantinya yang memiliki daya pembersih yang sama.
 - b. Suatu peralatan tidak boleh digunakan bergantian antara produk babi dan non babi meskipun sudah melalui proses pencucian.



BAB III

PROSES PENGAJUAN SERTIFIKASI HALAL DI LPPOM MUI PROVINSI LAMPUNG

A. Gambaran Umum Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia di Provinsi Lampung (LPPOM MUI di Provinsi Lampung)

1. Sejarah Singkat Berdirinya LPPOM MUI di Provinsi Lampung

LPPOM MUI (lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia) adalah lembaga yang khusus yang dibentuk oleh Dewan Pimpinan MUI untuk mengkaji produk-produk pangan, obat dan kosmetika halal yang beredar dalam masyarakat, yaitu dengan Sertifikasi Halal. Adapun tujuan pelaksanaan sertifikasi halal pada produk-produk tersebut adalah untuk memberikan kepastian kehalalan yang suatu produk sehingga dapat menentramkan batin yang mengkonsumsinya, dan juga sebagai alat promosi suatu produk.¹

Pembentukan LPPOM MUI didasarkan atas mandat dan pemerintah/negara agar Majelis Ulama Indonesia (MUI) berperan aktif dalam meredakan kasus lemak babi di Indonesia pada tahun 1998. LPPOM MUI didirikan pada tanggal 06 Januari 1989 untuk melakukan pemeriksaan dan sertifikasi halal.² Sedangkan LPPOM MUI Lampung dibentuk oleh DP MUI

¹Majelis Ulama Indonesia Provinsi Lampung, *Kilas Balik 40 Tahun Majelis Ulama Indonesia Provinsi Lampung (Berkarya Untuk Umat*, (Bandar Lampung: Lintas Kreasi, 2014), h. 64.

²LPPOM-MUI, *tentang LPPOM-MUI*”, tersedia di http://www.halalmui.org/mui14/index.php/main/go_to_section/2/31/page/1, Diakses tanggal 29 Oktober 2017.

Provinsi Lampung dan dikukuhkan oleh pimpinan LPPOM MUI Pusat (Prof. Dr. Hj. Aisjah Gerindra) Pada tanggal 06 Februari 1996 di Hotel Indra Place Bandar Lampung.³

Untuk memperkuat posisi LPPOM MUI menjalankan fungsi sertifikasi halal, maka pada tahun 1996 ditandatangani Nota Kesepakatan Kerjasama antara Departemen Agama, Departemen Kesehatan dan MUI. Nota kesepakatan tersebut kemudian disusul dengan penerbitan Keputusan Menteri Agama (KMA) 518 Tahun 2001 dan KMA 519 Tahun 2001, yang menguatkan MUI sebagai lembaga sertifikasi halal serta melakukan pemeriksaan/audit, penetapan fatwa, dan menerbitkan sertifikat halal.⁴

Dalam proses dan pelaksanaan sertifikasi halal, LPPOM MUI melakukan kerja sama dengan Badan Pengawasan Obat dan Makanan (Badan POM), Kementerian Agama, Kementerian Pertanian, Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif serta sejumlah Perguruan-Perguruan Tinggi di Indonesia antara lain Institut Pertanian Bogor (IPB), Universitas Muhammadiyah Dr. Hamka, Universitas Djuanda, UIN, Universitas Wahid Hasyim Semarang, serta Universitas Muslimin Indonesia Makasar.⁵

³Majelis Ulama Indonesia Provinsi Lampung, *Kilas Balik 40 Tahun Majelis Ulama Indonesia Provinsi Lampung* (Berkarya Untuk Umat), *Op.cit*, h. 65.

⁴*Ibid*

⁵*Ibid*

Kerja sama dengan lembaga telah terjalin dengan Badan Standarisasi Nasional (BSN), Kadin Indonesia Komite Indonesia Tengah, GSI Indonesia, dan *Research in Motion (Blackberry)*. Khusus dengan Badan Pom, sertifikasi halal MUI merupakan persyaratan dalam pencantuman label halal pada kemasan untuk produk yang beredar di Indonesia.⁶

Kini, dalam usianya yang ke-26 tahun, LPPOM MUI semakin menunjukkan eksistensinya sebagai lembaga sertifikasi halal yang kredibel, baik di tingkat nasional maupun internasional. Sistem sertifikasi dan sistem jaminan halal yang dirancang serta diimplementasikan oleh LPPOM MUI telah pula diakui bahkan juga diadopsi oleh lembaga-lembaga sertifikasi halal luar negeri, yang kini mencapai 39 lembaga dari 23 negara.⁷

2. Visi dan Misi LPPOM MUI Provinsi Lampung

Visi LPPOM MUI Provinsi Lampung adalah membudayakan umat Islam untuk mengkonsumsi produk halal dan mengajarkan kepada seluruh pelaku usaha untuk memproduksi produk halal. Sementara misi LPPOM MUI Provinsi Lampung sebagai berikut :⁸

- a. Mengintensifkan pemeriksaan kehalalan pangan, obat-obatan dan kosmetika yang beredar di wilayah Indonesia;

⁶*Ibid*

⁷*Ibid*

⁸Wawancara dengan Ibu Ir. Oti Nawansih, MP bidang Standarisasi dan Sistem Informasi Manajemen, Pada 24 November 2017, Pukul 13.30-1430 WIB Di Teknologi Hasil Pertanian, UNILA.

- b. Meningkatkan kesadaran umat dalam mengkonsumsi produk halal melalui penyuluhan dan pendidikan bersama instansi yang terkait;
- c. Meningkatkan kesadaran produsen dalam memproduksi produk halal dengan penyuluhan dan pendidikan dengan mengenai produk halal bersama instansi lain;
- d. mempererat dan memperluas kerja sama dengan Lembaga Islam Nasional dan Internasional yang berorientasi pada Islam.

3. Struktur Organisasi Dan Pembagian Kerja di LPPOM MUI di Provinsi Lampung

Adapun susunan pengurus LPPOM MUI Provinsi Lampung Masa Khidmat 2016-2021 yakni:⁹

a. Dewan Penasehat:

1. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung
2. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung
3. Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung
4. Kepala Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung
5. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung
6. Kepala Dinas Perindustrian Provinsi Lampung
7. Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung

⁹Struktur Organisasi MUI Provinsi Lampung Tahun 2016-2021

8. Kepala Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Lampung
9. Ketua MUI Lampung yang membidangi Komisi Fatwa
10. Ketua MUI Lampung yang membidangi Komisi Pemberdayaan
Ekonomi

b. Dewan Pembina:

1. Ketua : Dr. KH. Khairuddin Tahmid, MH
2. Wakil Ketua : Direktur LPPOM MUI Pusat
3. Anggota : Dr. Ir. Sutikno, M.Sc.
Suryani, S.Sos., MM

c. Dewan Pelaksana:

1. Direktur : Dr. Ir. Yaktiworo Indriani, M.Sc.
2. Wakil Direktur : Drh.Sugeng Dwi Hastono
3. Wakil Direktur : Samsul Rizal, SP, M.Si.
4. Bendahara : H. Muhamad Ainul Wafa
5. Bidang Kesekretariatan : Maskut Candranegara, S.Pd.I
6. Bidang Auditing dan SJH :Dwi Retno Mulyaningrum,
M.Eng.,M.Sc.
7. Bidang Pengkajian dan : Ir. Susilawati, MS
Penelitian
8. Bidang Sosialisasi dan : Dr. Sunandjak Agung Wiwaha
Informasi Halal
9. Bidang Pelatihan : Refliyanto, M.Pd.I

10. Bidang Organisasi dan : Mashuri, SP

Kelembagaan

11. Bidang Standart dan : Ir. Otik Nawansih, MP

Sistem Informasi Manajemen

d. Tenaga Ahli:

1. Ketua : Ir. H. Agustini,MM

2. Sekretaris : Ichwan Adji Wibowo, S.Pt., MM

3. Anggota : Dr. H.M. Aditya, M.Biomed

Dr. H. Iwan Dulmansyah, SKM., MS

Sri Afrida, S.Farm., Apt.

Dr. Ir., Susi Astuti, M.Si.

4. Program Kerja LPPOM MUI Provinsi Lampung

Secara sederhana program kerja LPPOM MUI adalah amanat dari MUI demi meluncurkan dan memastikan produk yang beredar dijamin kepastian halal. Beberapa program kerja LPPOM MUI Provinsi Lampung sebagai berikut:

- a. Mengadakan inventarisasi, klarifikasi dan pengkajian terhadap makanan, minuman, obat-obatan serta kosmetik yang beredar di masyarakat.
- b. Mengkaji dan mengkonsep peraturan-peraturan penyelenggaraan rumah makan (restoran), perhotelan, hidangan dalam pelayaran atau penerbangan, pemotongan hewan, pengolahan pangan dan berbagai jenis bahan lainnya agar semuanya dapat dijamin kehalalannya.

- c. Menerbitkan sertifikat halal agar masyarakat merasa tentram dalam mengkonsumsi makanan dan minuman.¹⁰

B. Sertifikasi Halal Majelis Ulama Indonesia Pada Makanan Olahan Keripik Pisang di Kota Bandar Lampung

1. Tata Cara Pembuatan Makanan Olahan Keripik Pisang Di Kota Bandar Lampung

Dalam pembuatan makanan olahan keripik pisang hal utama yang dipilih adalah jenis pisang. Pisang yang digunakan oleh pelaku usaha di Jalan Pagar Alam, Kelurahan Segalamider, Kecamatan Tanjung Karang Barat (Gg. PU) adalah Pisang kepo. Secara sederhana pembuatan keripik pisang di bagai menjadi 2 jenis yaitu :

1. Keripik pisang dengan campuran bahan perasa
2. Keripik pisang tanpa campuran perasa

Dalam wawancara penulis dengan salah satu pelaku usaha yang sudah memiliki sertifikasi halal LPPOM MUI, beliau menerangkan cara membuat keripik pisang yang biasa di jual di Jalan Pagar Alam, Kelurahan Segalamider, Kecamatan Tanjung Karang Barat (Gg.PU), sebagai berikut :

a. Keripik pisang dengan campuran bahan perasa

¹⁰ Wawancara dengan Ibu Ir. Otik Nawansih, MP, bidang Bidang Standarisasi dan Sistem Informasi Manajemen, di THP UNILA Lantai 2, Tanggal 23 November 2017 pukul 16.00-17.05 WIB.

Pertama siapkan bahan-bahan seperti :

1. Pisang

Pisang yang di gunakan dalam produksi UKM di Jalan Pagar Alam, Kelurahan Segalamider, Kecamatan Tanjung Karang (Gg.PU) Barat ini rata-rata menggunakan pisang kepok yang telah melalui pemilihan dalam artian pisang kepok yang digunakan pisang kepok yang memiliki kualitas yang baik.

2. Garam Halus

Garam yang di gunakan juga garam yang memiliki label nomor sertifikasi halal dari LPPOM MUI.

3. Minyak Goreng

Minyak goreng yang di gunakan juga minyak yang telah memiliki label nomor sertifikasi halal dari LPPOM MUI.

4. Bubuk Keju/Coklat,

Bubuk perasa yang di gunakan juga merupakan bubuk perasa alami yang mempunyai label nomor sertifikasi halal dari LPPOM MUI.

5. Air

Air yang di gunakan adalah air yang mengalir ini supaya air di jamin kesuciannya.

Langkah-langkah pembuatan keripik pisang rasa-rasa :

1. Kupas dan bersihkan pisang kepok dengan air yang mengalir
2. Iris tipis-tipis pisang kepok menggunakan pisau tajam seperti pisau
3. Siapkan air di dalam wadah (baskom) untuk menampung air dan pisang supaya menjaga pisang tetap berwarna menarik lalu taburi garam.
4. Sementara panaskan minyak goreng, setelah minyak goreng panas masukkanlah pisang kepok kedalam minyak goreng tersebut.
5. Selanjutnya setelah pisang matang dan terlihat warna kekuning-kuningan angkat pisang tersebut dan tiriskan.
6. Dan terakhir taburi perasa coklat atau keju secara merata pada pisang tersebut.

Selanjutnya untuk pembuatan keripik pisang yang tanpa bahan tidak jauh berbeda dengan yang menggunakan bahan, yaitu :

1. Pisang

Pisang yang di gunakan dalam produksi UKM di Jalan Pagar Alam, Kelurahan Segalamider, Kecamatan Tanjung Karang (Gg.PU) Barat ini rata-rata menggunakan pisang kepok yang telah melalui pemilihan dalam artian pisang kepok yang di gunakan pisang kepok yang memiliki kualitas yang baik.

2. Garam Halus

Garam yang di gunakan juga garam yang memiliki label nomor sertifikasi halal dari LPPOM MUI.

3. Minyak Goreng

Minyak goreng yang di gunakan juga minyak yang telah memiliki label nomor sertifikasi halal dari LPPOM MUI.

4. Air,

Air yang di gunakan adalah air yang mengalir ini supaya air di jamin kesuciannya.

Langkah-langkah pembuatan keripik pisang Rasa-rasa :

1. Kupas dan bersihkan pisang kepok dengan air yang mengalir
2. Iris tipis-tipis pisang kepok menggunakan pisau atau benda tajam seperti pisau
3. Siapkan air di dalam wadah (baskom) untuk menampung air dan pisang supaya menjaga pisang tetap berwarna menarik lalu taburi garam.
4. Sementara panaskan minyak goreng, setelah minyak goreng panas masukkanlah pisang kepok kedalam minyak goreng tersebut.
5. Selanjutnya setelah pisang matang dan terlihat warna kekuning-kuningan angkat pisang tersebut dan tiriskan.

Dalam segi penyimpanan pelaku usaha mengaku dapat bertahan hingga sebulan yang mana masih terjamin keamanan dan kehalalan nya. Demikianlah, cara pembuatan keripik pisang yang berlabel halal yang penulis wawancara, para produsen sangat paham benar dengan cara memilih bahan

campuran yang bersertifikasi halal seperti garam, minyak, perasa dan lain-lain.¹¹

2. Sistem dan Prosedur Sertifikasi Halal

Sertifikasi halal yang dilaksanakan di Indonesia berguna untuk membuat keamanan dan kenyamanan bagi konsumen muslim. Adanya peraturan yang dibuat pemerintah dan berkerjasama dengan Kementerian Agama menjadi salah satu hal yang mendasari berdirinya LPPOM MUI.

Mekanisme yang dibuat oleh LPPOM MUI dalam pengajuan sertifikasi halal bertujuan agar tidak adanya praktek pemalsuan label atau pembuat sertifikasi halal yang palsu.

Allah Swt Berfirman dalam Al- Qur'an yang berbunyi :¹²

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ
ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ٥٩

Artinya : *Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya (Q.S An-Nisaa' {4} : 59).*¹³

¹¹ Wawancara dengan Bp. Gunawan, Pelaku Usaha Keripik Pisang RIZKA, tanggal 01 Januari 2017.

¹² Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan terjemahan, *Op.Cit*, h. 185.

¹³ *Ibid*, h. 186

Dalam ayat ini menegaskan mengikuti pemerintah dan peraturan yang telah dibuat oleh ulama dan pemerintah. Sertifikasi halal juga menegaskan agar tidak membahayakan orang lain dalam perdagangan dikarenakan pemalsuan dan tidak jelasnya bahan.

Nabi Muhammad Saw bersabda :

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ سَعْدِ بْنِ مَالِكِ بْنِ سِنَانٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

Artinya : *Dari Abû Sa'îd Sa'd bin Mâlik bin Sinân al-Khudri Radhyallahu anhu, Rasûlullâh Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, "Tidak boleh ada bahaya dan tidak boleh membahayakan orang lain.(HR. Imam Malik)*

Hal ini juga tidak terlepas dari tujuan syariat Islam, yaitu *jalb Al-Masalih* (Mengambil Mashlahat) dan *daf' almafasiid* (menolak mudharat dan bahaya). Jika menurut kesehatan, suatu jenis makanan dapat membahayakan jiwa, maka makanan tersebut haram dikonsumsi¹⁴

Sejalan hal itu LPPOM MUI mengatur prosedur pembuatan sertifikasi halal. Produsen yang menginginkan sertifikasi halal mendaftarkan ke sekretariat LPPOM MUI dengan ketentuan sebagai berikut¹⁵

1. Bagi Industri Pengolahan:

¹⁴Bagian Proyek Sarana dan Prasarana Produk Halal Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, *Modul Pelatihan Auditor Internal Halal, Op.cit*, h. 115.

¹⁵Wawancara dengan Ibu Ir. Otik Nawansih, MP, bidang Bidang Standarisasi dan Sistem Informasi Manajemen, Tanggal 23 November 2017 pukul 16.00-17.05 WIB.

- a. Produsen harus mendaftarkan seluruh produk yang diproduksi di lokasi yang sama dan/atau yang memiliki merek/brand yang sama.
 - b. Produsen harus mendaftarkan seluruh lokasi produksi termasuk maklon dan pabrik pengemasan.
 - c. Ketentuan untuk tempat maklon harus dilakukan di perusahaan yang sudah mempunyai produk bersertifikat halal atau yang bersedia disertifikasi halal.
2. Bagi Restoran dan Katering:
- a. Restoran dan katering harus mendaftarkan seluruh menu yang dijual termasuk produk-produk titipan, kue ulang tahun serta menu musiman.
 - b. Restoran dan katering harus mendaftarkan seluruh gerai, dapur serta gudang.
3. Bagi Rumah Potong Hewan:
- Produsen harus mendaftarkan seluruh tempat penyembelihan yang berada dalam satu perusahaan yang sama.

Kebijakan dan prosedur harus dipenuhi oleh perusahaan yang mengajukan sertifikasi halal. Bagi usaha keripik pisang olahan yang ingin mendaftarkan sertifikasi halal LPPOM MUI, baik industri pengolahan (pangan, obat, kosmetika), Rumah Potong Hewan (RPH), restoran/katering/dapur, harus melakukan pendaftaran sertifikasi halal dan

memenuhi persyaratan sertifikasi halal. Berikut ini tahapan yang dilewati perusahaan yang akan mendaftar proses sertifikasi halal yaitu:¹⁶

1. Memahami Persyaratan Sertifikasi Halal dan Mengikuti Pelatihan SJH

Usaha keripik pisang olahan harus memahami persyaratan sertifikasi halal yang tercantum dalam HAS 2300. Setelah itu, perusahaan juga harus mengikuti pelatihan SJH yang diadakan LPPOM-MUI, baik berupa pelatihan reguler maupun Online (www.halalmui.com). Adapun informasi mengenai pelatihan SJH dapat dilihat di www.halalmui.com.

2. Menerapkan Sistem Jaminan Halal (SJH)

Usaha keripik pisang olahan harus menerapkan SJH sebelum melakukan pendaftaran sertifikasi halal, antara lain penetapan kebijakan halal, penetapan pelatihan, penyiapan prosedur terkait SJH, pelaksanaan internal audit dan kaji ulang manajemen.

3. Menyiapkan Dokumen Sertifikasi Halal

Usaha keripik pisang olahan harus menyiapkan dokumen yang diperlukan untuk sertifikasi halal, antara lain : daftar produk, daftar bahan dan dokumen bahan, daftar penyembelih (khusus RPH), matriks produk, manual SJH, diagram alir proses, daftar alamat fasilitas produksi, bukti sosialisasi kebijakan halal, bukti pelatihan internal dan bukti audit

¹⁶Bagian Proyek Sarana dan Prasarana Produk Halal Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, *Modul Pelatihan Auditor Internal Halal*, Op.cit, h. 50-52.

internal. Penjelasan mengenai dokumen sertifikasi halal dapat dilihat di user manual control yang dapat diunduh di www.halalmui.com

4. Melakukan Pendaftaran Sertifikasi Halal (Upload Data)

Pendaftaran sertifikasi halal dilakukan secara Online di sistem Cerol melalui website www.e-lppommui.org. Usaha kecil menengah harus membaca user manual Cerol terlebih dahulu untuk memahami prosedur sertifikasi halal. Perusahaan harus melakukan upload data sertifikasi sampai selesai, baru dapat diproses oleh LPPOM MUI.

5. Melakukan Monitoring Pre Audit dan Membayar Akad Sertifikasi

Setelah melakukan upload data sertifikasi, perusahaan harus melakukan Monitoring pre audit dan pembayaran akad sertifikasi. Monitoring pre audit disarankan dilakukan setiap hari untuk mengetahui adanya ketidaksesuaian pada hasil pre audit. Pembayaran akad sertifikasi dilakukan dengan mengunduh di Cerol, membayar biaya akad dan menandatangani akad, untuk kemudian melakukan pembayaran di cerol dan disetujui oleh Bendahara LPPOM MUI.

6. Pelaksanaan Audit

Audit dapat dilaksanakan apabila perusahaan sudah lolos pre audit dan akad sudah disetujui. Audit dilaksanakan di semua fasilitas yang berkaitan dengan produk yang disertifikasi.

Pemeriksaan produk halal di lokasi perusahaan dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut : *Pertama*, Surat resmi dikirim oleh LPPOM MUI

ke perusahaan yang akan diperiksa, yang memuat jadwal audit pemeriksaan dan persyaratan administratif lainnya. *Kedua*, LPPOM MUI menerbitkan surat perintah pemeriksaan yang berisi : a) Nama ketua dan anggota tim. b). Penetapan hari dan tanggal pemeriksaan. *Ketiga*, pada waktu yang telah ditentukan Tim Auditor yang telah dilengkapi dengan surat tugas dan identitas diri, akan mengadakan pemeriksaan (auditing) ke perusahaan yang mengajukan permohonan Sertifikasi Halal. Selama pemeriksaan berlangsung, produsen diminta memberikan informasi yang jujur dan jelas. *Keempat*, pemeriksaan (audit) produk halal mencakup : a. Manajemen produsen dalam menjamin kehalalan produk, b. Observasi lapangan dan c. Pengambilan contoh hanya untuk bahan yang dicurigai mengandung babi atau turunannya, yang mengandung alkohol dan yang dianggap perlu.¹⁷

7. Melakukan Montoring Pasca Audit

Setelah melakukan upload data sertifikasi, perusahaan harus melakukan Monitoring pre audit dan pembayaran akad sertifikasi. Montoring pasca audit disarankan dilakukan setiap hari untuk mengetahui adanya ketidaksesuaian agar dilakukan perbaikan.

8. Memperoleh Sertifikat Halal

Perusahaan dapat mengunduh sertifikat halal dalam bentuk softcopy di Cerol. Sertifikat halal yang asli dapat diambil di kantor LPPOM-MUI

¹⁷ Wawancara dengan Bp. Refliyanto S.Pd, Kepala Bidang Pelatihan, Tanggal 25 November 2017 pukul 10.00-11.00 WIB.

Jakarta dan dapat juga dikirim ke alamat perusahaan. Sertifikat halal berlaku selama 2 (dua) Tahun.

3. Akibat Hukum Penetapan Sertifikasi Halal LPPOM MUI Provinsi Lampung pada Makanan Olahan Keripik Pisang di Kota Bandar Lampung

Sertifikasi halal adalah surat keterangan yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) pusat atau Provinsi tentang halnya suatu produk makanan, minuman, obat-obatan dan kosmetika yang diproduksi oleh perusahaan setelah diteliti dan dinyatakan halal oleh LPPOM MUI. Pemegang otoritas menerbitkan sertifikasi produk halal adalah MUI yang secara teknis ditangani oleh Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika (LPPOM)¹⁸

Bagi konsumen, sertifikat halal memiliki beberapa fungsi, *Pertama*, terlindunginya konsumen muslim dari mengkonsumsi pangan, obat-obatan dan kosmetika yang tidak halal; *kedua*, secara kejiwaan perasaan hati dan batin konsumen akan tenang; *ketiga*, mempertahankan jiwa dan raga dari keterpurukan akibat produk haram; dan *keempat*. Akan memberikan kepastian dan perlindungan hukum.¹⁹

Bagi produsen, sertifikat halal mempunyai beberapa peran penting, *Pertama*, sebagai pertanggungjawaban produsen kepada konsumen muslim, mengingat masalah halal merupakan bagian dari prinsip hidup muslim, *kedua*,

¹⁸KN. Sofyan Hasan, "Kepastian Hukum Sertifikasi dan Labelisasi Halal Produk Pangan" *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 14 No. 2 Mei 2014, h. 230.

¹⁹*Ibid*, h. 230.

meningkatkan kepercayaan dan kepuasan konsumen, *ketiga*, meningkatkan citra dan daya saing perusahaan, dan *keempat*, sebagai alat pemasaran serta untuk memperluas area jaringan pemasaran, dan *kelima*, memberi keuntungan pada produsen dengan meningkatkan daya saing dan *omzet* produksi dan penjualan.²⁰

Sertifikasi juga harus menjangkau bahan baku, bahan tambahan maupun bahan penolong dalam bentuk bukan kemasan yang tidak diecerkan untuk bahan produk makanan, minuman, obat-obat, kosmetik, dan produk lainnya yang beredar di masyarakat. Sertifikasi produk halal diberlakukan tidak hanya terhadap produk dalam negeri tetapi juga produk luar negeri. Mengenai produk yang bersertifikat halal dari lembaga sertifikat luar negeri, perlu diperhatikan bahwa tidak semua standar luar negeri atau internasional dapat diterapkan di Indonesia karena di Indonesia batasan halal adalah yang paling ketat dan tidak dapat disimpangi. Misalnya di luar negeri babi yang telah berubah menjadi X dapat menjadi tidak diharamkan lagi, sedangkan di Indonesia babi yang telah mengalami perubahan apapun tetaplah diharamkan.

Terdapat sejumlah lembaga yang terlibat dalam persoalan halal haram suatu produk, yaitu Departemen Agama. Badan POM, dan MUI (Komisi Fatwa MUI, LPPOM MUI), Departemen Pertanian tergabung dalam Komite Halal Indonesia (KHI). Sertifikat halal berlaku dua tahun dan dapat diperbarui untuk jangka waktu yang sama. Setiap pelaku usaha yang telah mendapatkan

²⁰*Ibid.*

sertifikat halal terhadap produknya mencantumkan keterangan atau tulisan halal dan nomor sertifikat pada label setiap kemasan produk. Selama berlaku sertifikat halal tersebut, perusahaan harus dapat memberikan jaminan bahwa segala perubahan baik dari segi penggunaan bahan, pemasok, maupun teknologi proses hanya dapat dilakukan dengan sepengetahuan LPPOM MUI yang menerbitkan sertifikat halal. Jaminan tersebut dituangkan dalam suatu sistem yang disebut Sistem Jaminan Halal (SJH). SJH dibuat oleh perusahaan berdasarkan buku panduan yang dikeluarkan oleh LPPOM MUI.²¹

Sebagaimana keinginan masyarakat tentang lembaga negara yang mengatur tentang sertifikasi halal yang dahulu hanya bersifat sukarela saat ini aturan terbaru UU No. 33 tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal mengharuskan seluruh produk makanan dan minuman baik olahan dan kemasan bersertifikat halal dan berlabel halal.

Sebagaimana data yang terdapat pada lapangan pengolahan keripik pisang di salah satu tempat yang terkenal di daerah Bandar Lampung di jalan Pagar Alam, Kelurahan Segalamider, Kecamatan Tanjung Karang Barat (Gang PU), terdapat beberapa pengolahan keripik pisang yang belum memiliki sertifikat halal dari LPPOM MUI. Mengingat hal tersebut sudah diatur dalam undang-undang. Sebagaimana telah di uraikan manfaat dan kegunaan mendapat sertifikasi halal MUI bukan hanya produsen yang di

²¹*Ibid.*

untungan dan konsumen yang di jamin kesehatan dan kehalalannya melainkan sudah menjalankan amanah negara dengan baik.



BAB IV

SERTIFIKASI HALAL DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM

A. Prosedur Pengajuan Sertifikasi Halal LPPOM MUI Di Provinsi Lampung

Dalam berkembangnya zaman membawa pada perubahan yang positif dan negatif, teknologi, pakaian, pendidikan, dan hukum. Termasuk berbagai macam produk makanan salah satunya di Indonesia berkembang. Dari yang tanpa bahan tambahan dan menggunakan bahan tambahan. Sebagian produk tersebut secara resmi terdaftar di lembaga negara Indonesia yang mempunyai tugas mensertifikasi produk makanan yang beredar di Indonesia.¹

Menaati Allah dan Rasulnya serta *Ulil Amri* adalah suatu kewajiban, di mana di sini pemerintah adalah *ulil amri* yang harus ditaati dalam hal kebaikan. Sebagaimana firman Allah *Subhanallahu Wa Ta'ala* :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ

فَإِنْ تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ

بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ٥٩

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan

¹Wawancara dengan Ibu Ir. Susilawati, MS Bidang Pengkajian dan Penelitian, Pada 23 November 2017, Di Teknologi Hasil Penelitian Unila, pukul 15.00.16.00 WIB.

*hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya (Q.S An-Nisaa' {4} : 59).*²

Sejalan dengan itu sebagai sikap implementasi pemerintah dan ulama. Dalam UUD 1945 pasal 1 ayat (3) berbunyi Indonesia adalah negara hukum. Itu artinya Indonesia memegang hukum tertulis (positif). Masyarakat Indonesia secara keseluruhan adalah masyarakat muslim yang diharuskan memakan produk pangan halal. Sejalan dengan itu pada pasal 97 ayat (1) UU pangan, menegaskan bahwa setiap orang yang memproduksi Pangan di dalam negeri untuk diperdagangkan wajib mencantumkan label di dalam dan/atau pada Kemasan Pangan, lalu pada Pasal 97 ayat (3) disebutkan bahwa pencantuman label tersebut memuat paling sedikit keterangan mengenai: antara lain pada huruf (e) : halal bagi yang dipersyaratkan. Demikian juga dalam Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, selanjutnya disingkat UUPK. Pada pasal 8 ayat (1) huruf (h) UUPK, ditegaskan bahwa pelaku usaha dilarang memproduksi dan atau memperdagangkan barang dan jasa yang tidak memenuhi ketentuan produksi secara halal, seperti pernyataan halal yang dicantumkan dalam label. Pada pasal 1 PP 69/1996, menyatakan bahwa setiap keterangan mengenai pangan yang berbentuk gambar, tulisan, kombinasi keduanya atau bentuk lain yang disertakan pada pangan, dimasukkan ke dalam, ditempelkan pada atau

² Departemen Agama RI, *Op.Cit*, h. 186.

merupakan bagian konsumen pangan, merupakan label pangan.³ Serta dikuatkan dengan UU No. 33 Tahun 2014 pasal 4 berbunyi Produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal.

Bagi usaha keripik pisang olahan yang ingin mendaftarkan sertifikasi halal LPPOM MUI, baik industri pengolahan (pangan, obat, kosmetika), Rumah Potong Hewan (RPH), restoran/katering/dapur, harus melakukan pendaftaran sertifikasi halal dan memenuhi persyaratan sertifikasi halal. Berikut ini tahapan yang dilewati perusahaan yang akan mendaftar prosedur pengajuan sertifikasi halal yaitu:⁴

1. Memahami Persyaratan Sertifikasi Halal dan Mengikuti Pelatihan SJH

Usaha keripik pisang olahan harus memahami persyaratan sertifikasi halal yang tercantum dalam HAS 2300. Setelah itu, perusahaan juga harus mengikuti pelatihan SJH yang diadakan LPPOM MUI, baik berupa pelatihan reguler maupun Online (www.halalmui.com). Adapun informasi mengenai pelatihan SJH dapat dilihat di www.halalmui.com.

Dalam memberi pelatihan terdiri dari 9 aspek seperti, interpretasi dan implementasi sisten jaminan halal di restoran, katering, dapur atau internal audit sistem jaminan halal. Pelaku usaha dapat memilih salah satu yang

³Sofyan Hasan, *Sertifikasi Halal Dalam Hukum Positif Regulasi dan Implementasi di Indonesia*, (Yogyakarta, 2014), *Op.cit*, h. 150.

⁴ Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika MUI, *Indonesia Halal Directory 2015-2016*, (Jakarta: DEPAG RI, 2015), h. 44.

dimana seharusnya pelaku usaha melakukan semua 9 aspek pelatihan tersebut hal ini dipertanyakan dengan legalitas sertifikasi halal yang nanti dijalankan oleh pelaku usaha.

2. Menerapkan Sistem Jaminan Halal (SJH)

Usaha keripik pisang olahan harus menerapkan SJH sebelum melakukan pendaftaran sertifikasi halal, antara lain penetapan kebijakan halal, penetapan pelatihan, penyiapan prosedur terkait SJH, pelaksanaan internal audit dan kaji ulang manajemen.

Sebagaimana yang telah disebutkan di prosedur pertama, penerapan sistem jaminan halal tidak bermasalah apabila dijalankan dengan baik dan benar terutama oleh pelaku usaha tersebut.

3. Menyiapkan Dokumen Sertifikasi Halal

Usaha keripik pisang olahan harus menyiapkan dokumen yang diperlukan untuk sertifikasi halal, antara lain : daftar produk, daftar bahan dan dokumen bahan, daftar penyembelih (khusus RPH), matriks produk, manual SJH, diagram alir proses, daftar alamat fasilitas produksi, bukti sosialisasi kebijakan halal, bukti pelatihan internal dan bukti audit internal. Penjelasan mengenai dokumen sertifikasi halal dapat dilihat di user manual control yang dapat diunduh di www.halalmui.com.

Penyiapan dokumen dilakukan oleh pelaku usaha. Dalam penyiapan dokumen ditekankan kepada kejujuran pelaku usaha itu sendiri dan dapat dipertanggung jawabkan.

4. Melakukan Pendaftaran Sertifikasi Halal (Upload Data)

Pendaftaran sertifikasi halal dilakukan secara Online di sistem Cerol melalui website www.e-lppommui.org. Usaha kecil menengah harus membaca User Manual Cerol terlebih dahulu untuk memahami prosedur sertifikasi halal. Perusahaan harus melakukan upload data sertifikasi sampai selesai, baru dapat diproses oleh LPPOM MUI.

5. Melakukan Monitoring Pre Audit dan Membayar Akad Sertifikasi

Setelah melakukan upload data sertifikasi, perusahaan harus melakukan Monitoring pre audit dan pembayaran akad sertifikasi. Monitoring pre audit disarankan dilakukan setiap hari untuk mengetahui adanya ketidaksesuaian pada hasil pre audit. Pembayaran akad sertifikasi dilakukan dengan mengunduh di Cerol, pembayaran biaya akad dan menandatangani akad, untuk kemudian melakukan pembayaran di cerol dan disetujui oleh Bendahara LPPOM MUI.

Dalam hal ini tim pre audit LPPOM mendatangi perusahaan, mengecek secara berkala hingga jadwal pelaksanaan audit ditentukan. Tentang kebersihan atau kelayakan bahan. Dalam fakta lapangan pre audit biasanya tidak secara penuh dilaksanakan dikarenakan pelaksanaan audit sudah memadai. Menyikapi hal ini mentoring pre audit dilaksanakan oleh pelaku usaha bersangkutan.

6. Pelaksanaan Audit

Audit dapat dilaksanakan apabila perusahaan sudah lolos pre audit dan akad sudah disetujui. Audit dilaksanakan di semua fasilitas yang berkaitan dengan produk yang disertifikasi.

Pemeriksaan produk halal di lokasi perusahaan dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut : *Pertama*, Surat resmi dikirim oleh LPPOM MUI ke perusahaan yang akan diperiksa, yang memuat jadwal audit pemeriksaan dan persyaratan administratif lainnya. *Kedua*, LPPOM MUI menerbitkan surat perintah pemeriksaan yang berisi : a) Nama ketua dan anggota tim. b). Penetapan hari dan tanggal pemeriksaan. *Ketiga*, pada waktu yang telah ditentukan Tim Auditor yang telah dilengkapi dengan surat tugas dan identitas diri, akan mengadakan pemeriksaan (auditing) ke perusahaan yang mengajukan permohonan Sertifikasi Halal. Selama pemeriksaan berlangsung, produsen diminta memberikan informasi yang jujur dan jelas. *Keempat*, pemeriksaan (audit) produk halal mencakup : a. Manajemen produsen dalam menjamin kehalalan produk, b. Observasi lapangan dan c. Pengambilan contoh hanya untuk bahan yang dicurigai mengandung babi atau turunannya, yang mengandung alkohol dan yang dianggap perlu.⁵

Pelaksanaan audit halal eksternal berasal dari pihak LPPOM MUI yang terdiri dari relawan dan non relawan. Audit halal berasal dari semua

⁵ Wawancara dengan Bp. Refliyanto, *Op.cit.*

kalangan dengan pendidikan terakhir SMA/ sederajat dan Strata Satu (S1).

Saat melakukan audit terdiri dari 3 orang.

Penjadwalan pemeriksaan lapangan bertujuan untuk persiapan pelaku usaha bersangkutan. Apabila jadwal telah diketahui oleh kedua belah pihak maka setelah itu audit melakukan pengecekan pada perusahaan bersangkutan. Dalam hal ini jadwal yang sudah diatur oleh LPPOM MUI agar tidak dikhawatirkan terjadi manipulasi bahan-bahan tambahan yang dicurigai oleh audit halal oleh pelaku usaha sendiri yang di mana hal itu bertujuan untuk kepentingan pelaku usaha sendiri.

7. Melakukan Montoring Pasca Audit

Setelah melakukan upload data sertifikasi, perusahaan harus melakukan Monitoring pasca audit. Montoring pasca audit disarankan dilakukan setiap hari untuk mengetahui adanya ketidaksesuaian agar dilakukan perbaikan.

Montoring pasa audit dilaksanakan oleh auditor halal internal, yaitu pimpinan perusahaan tersebut kepada karyawannya. Monitoring juga melakukan laporan setiap 6 (enam) bulan sekali kepada LPPOM MUI sebagai pertanggung jawaban sertifikasi halal. Dikarenakan Monitoring adalah pemimpin perusahaan sebagai agen ganda LPPOM MUI dan perusahaan miliknya dikhawatirkan Montoring ini berat sebelah. LPPOM MUI tidak jarang hanya menerima laporan dari perusahaan tersebut

disebabkan kekurangan audit halal yang setiap 6 (enam) bulan sekali mengecek perusahaan bersangkutan.

8. Memperoleh Sertifikat Halal

Perusahaan dapat mengunduh sertifikat halal dalam bentuk softcopy di Cerol. Sertifikat halal yang asli dapat diambil di kantor LPPOM-MUI Jakarta dan dapat juga dikirim ke alamat perusahaan. Sertifikat halal berlaku selama 2 (dua) Tahun.

Label halal dikeluarkan oleh Balai POM (BPOM) sedangkan sertifikat halal dikeluarkan oleh LPPOM MUI. Prosedur pendaftaran label halal adalah dengan mengajukan syarat permohonan ijin pemasangan label halal dilampiri dengan copy sertifikat halal kepada Balai POM⁶.

Biaya yang dibutuhkan untuk mendaftarkan sertifikat halal, di bedakan menjadi tiga⁷ yaitu :

1. Biaya Pendaftaran
2. Biaya Auditing

Biaya ini meliputi biaya transportasi akomodasi dan honorium.

3. Biaya Sertifikasi

Besarnya biaya sertifikasi tergantung pada besarnya perusahaan dan luasnya jangkauan pemasaran produk.

⁶Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan kosmetika Majelis Ulama Indonesia, *Panduan Umum Sistem Jaminan Halal LP POM-MUI*, Op.Cit, h. 58.

⁷*Ibid*, h. 59

Biaya sertifikasi halal dibebankan kepada Pelaku Usaha yang mengajukan permohonan Sertifikat Halal. Biaya sertifikat halal dibagi menjadi empat kelompok jenis industri, yaitu kelompok industri pengolahan, industri flavour, restoran/catering dan rumah potong hewan.

Besaran biaya sertifikasi halal berdasarkan Surat Keputusan Direktur Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia, Nomor: SK 04/Dir/LPPOM MUI/XI/07, tentang Biaya Memperoleh Sertifikat Halal.

1. Biaya Sertifikat Halal Industri Pengolahan

Biaya sertifikat untuk produk-produk makanan, minuman, obat, kosmetika dan penyembelihan hewan diluar flavor, rumah potong hewan dan restoran ditentukan atas dasar besar kecil perusahaan dengan mempertimbangkan :

- A. Golongan usaha/kapasitas produksi/omzet
- B. Kerumitan pemeriksaan
- C. Teknologi yang digunakan

Tabel biaya sertifikat halal industri pengolahan

B	Usaha Besar		Usaha Menengah		Usaha Kecil	
	B1	B2	B1	B2	B1	B2
C1	4.500.000	4.000.000	3.500.000	2.500.000	2.000.000	1.000.000
C2	4.000.000	3.500.000	3.000.000	2.000.000	1.000.000	500.000

Keterangan :

A. Golongan usaha/kapasitas produksi

Usaha besar

1. Badan usaha berbentuk PT atau CV
2. Luas pemasaran internasional

Usaha menengah

1. Badan usaha berbentuk PT, CV dan UD
2. Kapasitas produksi dengan luas pemasaran secara lokal atau nasional

Usaha kecil

1. Badan usaha berbentuk PIRT
2. Kapasitas produksi dengan luas pemasaran dibawah 3 provinsi
3. Tempat produksi hanya ada satu.

Penjelasan :

B : Kerumitan pemeriksaan

B1: Titik kritis bahan 4 atau lebih, Jumlah bahan 5 atau lebih

B2: Titik kritis bahan maksimal 3, Titik kritis tersebut tidak memerlukan pengkajian melebihi 2 langkah (turunan) sudah dapat meyakinkan, Jenis produk sederhana. Seperti AMDK, karbon aktif dan Taurin

C :Teknologi yang digunakan

C1: Modern: Apabila proses produksi dominan menggunakan mesin

C2: Konvensional: Apabila dalam proses produksi dominan menggunakan tenaga manusia.

Secara nominal biaya sertifikat halal berkisar antara Rp.2.000.000 sampai Rp.4.500.000 per jenis produk.

Bagi perusahaan yang mempunyai jumlah merk/nama dagang atau model kemasan yang cukup banyak (di atas 5 macam), dikenakan biaya tambahan sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) per merk atau model kemasan.

Bagi perusahaan yang mempunyai lebih dari satu pabrik, akan dikenakan biaya tambahan sebesar Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) per pabrik bagi perusahaan besar, sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) per pabrik bagi perusahaan menengah.

Bagi perusahaan PIRT yang mempunyai pabrik atau tempat pengolahan lebih dari satu akan dikenakan biaya tambahan sebesar Rp. 500.000. Apabila perusahaan mempunyai jenis produk lebih dari satu dalam satu sertifikat akan dikenakan biaya tambahan antara Rp. 1.500.000 sampai Rp. 3.000.000

Biaya rincian sertifikasi halal yang dipaparkan di atas belumlah dengan tambahan biaya diluar itu. Sertifikasi halal hanya berlaku selama 2 (dua) tahun sejak dikeluarkannya sertifikat halal. Sedangkan sistem pengawasannya⁸, sebagai berikut :

⁸*Ibid*, h. 59.

1. Perusahaan wajib mengimplementasikan Sistem Jaminan Halal sepanjang berlakunya Sertifikat Halal.
2. Perusahaan berkewajiban menyerahkan laporan audit internal setiap (enam) bulan sekali setelah terbitnya Sertifikat Halal.
3. Perubahan bahan, proses produksi dan lainnya perusahaan wajib melaporkan dan mendapat izin dari LPPOM MUI.

Setelah habis masa berlaku sertifikat halal yakni selama dua tahun, maka perusahaan diwajibkan memperpanjang bagi masa sertifikatnya dengan prosedur sebagai berikut :

1. Produsen harus mendaftar kembali dan mengisi barang yang disediakan.
2. Pengisian borang disesuaikan dengan perkembangan terakhir produk
3. Produsen berkewajiban melengkapi kembali daftar bahan baku, matrik produk versus bahan serta spesifikasi. Sertifikat halal dan bagan alur proses terbaru.
4. Prosedur pemeriksaan dilakukan seperti pada pendaftaran produk baru.
5. Perusahaan harus sudah mempunyai manual sistem Jaminan Halal sesuai dengan ketentuan prosedur sertifikasi halal di atas.

Produsen yang tidak memperbarui sertifikat halalnya maka tidak akan diizinkan lagi untuk menggunakan sertifikat halal tersebut dan dihapus dari daftar yang terdapat dalam majalah resmi LPPOM MUI jurnal halal.

B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Legalitas Sertifikasi Halal

Di Indonesia memiliki jumlah penduduk muslim terbesar, sehingga diperlukan suatu lembaga yang dapat memberikan jaminan kepada masyarakat muslim tentang produk makanan yang beredar di pasar adalah produk halal. LPPOM MUI merupakan suatu lembaga yang dibentuk oleh MUI untuk melindungi konsumen muslim dalam mengkonsumsi makanan, minuman, obat-obatan maupun kosmetika dengan jalan melalui kegiatan sertifikasi yang dilakukan oleh pelaku usaha guna mendapatkan sertifikat halal dari pihak LPPOM MUI.

Sejalan dengan itu pada ayat Qur'an banyak yang menjelaskan ayat tentang kehalalan.

Allah Subhanallah Ta'ala berfirman :

فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ إِلَى طَعَامِهِ ٢٤

Artinya : *Maka hendaklah manusia itu memperhatikan makanannya* (Q.S ' Abassa{80} : 24)⁹

Ayat tersebut menunjukan bahwa Allah SWT memerintahkan manusia untuk senantiasa memperhatikan dan bersikap hati-hati terhadap makanan yang akan dikonsumsi, tidak hanya dari segi bagaimana makanan itu dibuat dan diciptakan, tetapi juga manfaat atau khasiat dari makanan tersebut. Selain itu juga, Allah SWT juga memerintahkan umat manusia untuk mengkonsumsi

⁹Departemen Agama RI, *Op. Cit*, h. 1353.

makanan yang halal dan juga baik, sebagaimana firman-Nya dalam Al-Qur'an:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ

إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ ١٦٨

Artinya : *Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu. (Q.S Al-Baqarah {2} ; 168)*¹⁰

Allah SWT telah membolehkan (mengahalalkan) makanan apa saja yang ada di bumi bagi seluruh manusia. Makanan yang dimaksud adalah makanan yang halal dan juga *thoyyib* (baik). Makanan halal tidak hanya dari segi wujudnya, tetapi juga halal dari segi bagaimana cara mendapatkannya dan juga halal proses pengolahan dari makanan tersebut. Sedangkan makanan yang *thayyib* (baik) yaitu makanan yang tidak hanya sekedar mengenyangkan tetapi juga terdapat kebaikan dan juga manfaat dari makanan yang dikonsumsi dan juga tidak menimbulkan bahaya bagi tubuh dan akal pikiran.

Sebagaimana yang telah disebutkan dalam ayat diatas. Manusia tidak boleh mengubah yang dilarang (Haram) menjadi diperbolehkan (halal) dan

¹⁰ *Ibid*, h. 56.

juga sebaliknya, karena hal tersebut kesyirikan dan kejahatan.¹¹ Seperti yang terdapat dalam firman Allah SWT dalam Al-Qur'an :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ
الْمُعْتَدِينَ ۚ ۝٨٧ وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ ۝٨٨

Artinya : *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu haramkan apa-apa yang baik yang telah Allah halalkan bagi kamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah rezezikkan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya. (Q.S. Al-Maidah : 87-88).*¹²

Ketentuan halal disebutkan dalam ayat tersebut di Indonesia diwujudkan pemerintah melalui peran MUI yang memiliki wewenang dalam menangani masalah halal yang berkaitan dengan pangan, obat-obatan, dan juga kosmetika. Label halal yang tercantum pada kemasan menandakan bahwa makanan tersebut telah dijamin kehalalannya oleh LPPOM MUI untuk dikonsumsi masyarakat sebagaimana sesuai dengan ketentuan label *thayyib* dalam Islam. Selain itu juga dengan adanya label halal pada setiap kemasan, masyarakat khususnya bagi umat Muslim menjadi lebih nyaman dan merasa aman ketika mengkonsumsi bermacam-macam makanan, minuman, obat-obatan maupun kosmetika.

¹¹ Syekh Muhammad Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram dalam Islam*, Alih Bahasa H. Muhammad Hamidy. Surabaya: PT. Bina Ilmu Surabaya, 2003), h. 14-46.

¹² Departemen Agama RI, *Op.Cit*, h. 162

Pada era teknologi sekarang ini yang perlu diperhatikan terhadap suatu produk adalah bahan dan prosesnya. Dalam hal bahan, akan mudah penetapan status kehalalannya bila bahan yang digunakan tersebut merupakan bahan segar tanpa melalui proses pengolahan. Lain halnya jika bahan segar tanpa proses pengolahan. Dalam proses pengolahan terkadang ditambahkan bahan tambahan atau bahan penolong sehingga perlu pengkajian lebih lanjut dalam penetapan status kehalalannya. Dalam hal proses pengolahan pangan, yang menjadi perhatian adalah terjadinya percampuran (*ikhtilah*) atau jika bahan tersebut dikeluarkan kembali dari produk, setidaknya akan terjadi pemanfaatan (*intifa'*) bahan yang mungkin berasal dari bahan yang haram dan najis. Kedua kondisi ini membuat status kehalalan produk menjadi sulit. Terlebih lagi perkembangan teknologi pangan pada saat ini telah sampai pada kondisi dimana begitu banyak bahan baku dan bahan tambahan yang digunakan dalam industri makanan olahan.¹³

Secara teknis, produk-produk makanan dan minuman olahan dihasilkan melalui proses di mana tidak diketahui secara jelas apakah bahan-bahan yang digunakan untuk membuat produk tersebut suci dan halal dan apakah cara dan proses pengolahannya sesuai dengan ketentuan syari'at Islam. Terlebih lagi jika produk tersebut berasal dari negeri yang penduduknya mayoritas non muslim, sekalipun bahan bakunya berupa barang

¹³ Muhammad Koliq, *Studi Analisis Terhadap Produk Makanan dan Minuman Olahan yang Belum Bersertifikat Halal (Studi Kasus pada IKM di Kota Semarang,)*, Skripsi Sarjana Fakultas Syrai'ah IAIN Walisongo, Semarang, 2010, h. 78.

suci dan halal tidak tertutup kemungkinan dalam proses pengolahannya tercampur bahan-bahan yang haram atau najis. Ketidakjelasan ini menyebabkan status hukum dari produk olahan tersebut menjadi samar (tidak jelas halal-haramnya).

Sejatinya pemerintah sudah membuat Undang-undang terbaru yang mana undang-undang tersebut mengimplementasikan dari hukum Al-Qur'an dan Al-Hadist. UU No.33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal. Berdasarkan bunyi pasal 4 UU No.33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal “ *Setiap Produk makanan dan minuman yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal.*” Ketentuan tersebut menjadikan sertifikasi dan labelisasi halal sebuah kewajiban bagi para pelaku usaha.

Pada intinya secara fiqiyah, sertifikasi halal adalah sebuah aturan normatif yang dibuat, di usulkan dan disetujui oleh ulama dan pemerintah yang dalam hal ini dapat disebut sebagai ijma' yang mana ulama bersepakat bahwa sertifikasi dan labelisasi halal di bidang mu'amalah (jual beli) khususnya pangan harus disertai dengan legalitas sertifikat halal yang nash sudah mengaturnya.

Sebagaimana firman Allah SWT : ¹⁴

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ

¹⁴ Departemen Agama RI, *Loc.cit.*

فَإِنْ تَنَزَّعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ
وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ٥٩

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya (Q.S An-Nisaa' {4} : 59)

Perkataan *Amri* yang terdapat pada ayat di atas berarti hal, keadaan atau urusan yang bersifat umum meliputi urusan dunia dan urusan agama. *Ulil Amri* dalam urusan dunia ialah raja, kepala negara, pemimpin atau penguasa, sedang *ulil amri* dalam urusan agama ialah para mujtahid.

Dari ayat di atas dipahami bahwa jika para *ulil amri* itu telah sepakat tentang sesuatu ketentuan atau hukum dari suatu peristiwa, maka kesepakatan itu hendaklah dilaksanakan dan dipatuhi oleh kaum muslimin.

Sejalan dengan *Ijma*, hukum *fiqiyah* tentang *Qiyas*,. Yang mana sertifikasi halal belum ada dalam Qur'an dan dibuatlah oleh manusia (para muslimin). *Qiyas* secara bahasa mengukur dan membandingkan sesuatu dengan yang semisalnya.¹⁵

Menurut para ulama *ushul fikih*, *qiyas* ialah menetapkan hukum suatu kejadian atau peristiwa yang tidak ada dasar *nashnya* dengan cara membandingkannya kepada suatu kejadian atau peristiwa yang lain yang telah

¹⁵Mardani, *Hukum islam: Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2010, hlm. 150.

ditetapkan hukumnya berdasarkan nash karena ada persamaan ‘*illat*’ antara kedua peristiwa itu.¹⁶

Qiyas terkait sertifikasi halal sudah sesuai dengan salah satu rukun qiyas yaitu *Ashal*, yang berarti pokok, yaitu suatu peristiwa yang telah ditetapkan hukumnya berdasarkan nash. *Ashal* disebut juga *maqis’ aliah* (yang menjadi ukuran) atau *musyabbah bih* (tempat menyerupakan), atau *mahmul’alaih* (tempat membandingkan)¹⁷.

Dengan demikian, sertifikasi halal yang tidak disebutkan dalam Qur’an tetapi dibandingkan dan diukur dengan nash “*makanlah yang halal bagimu*” dapat menguatkan secara legalitas Undang-undang.

Terakhir, Masalah yang dalam bahasa mendatangkann kebaikan atau membawa kemanfaatan dan atau menolak kerusakan¹⁸ dengan ini tercapainya makanan dan minuman yang sehat, halal dan baik. Perlu adanya pencantuman label halal yang ditandai dengan sertifikasi halal. Dimana pedagang kurang menyadari arti pentingnya hal tersebut. Dengan adanya sertifikasi halal, masalah dapat tercapai dan menentramkan umat. Masalah dalam hal ini adalah maslahaha mursalah , yaitu kemaslahatan- kemaslahatan yang timbul setelah Nabi SAW. Wafat, kemaslahatan yang muncul dalam benak pikiran manusia sepeninggal Nabi, dan maslahah tersebut diakui dan tidak berlawanan

¹⁶Sofyan Hasan, *Sertifikasi Halal Dalam Hukum Positif Regulasi dan Implementasi di Indonesia*, Yogyakarta, 2014, *Loc. It*, hlm 88

¹⁷*Ibid*, hlm 93

¹⁸Munawar Kholil, *Kembali Kepada Al- Qur’an dan As-Sunnah*, Semarang: Bulan Bintang, 1995, hlm. 43.

dengan syari'at.¹⁹ Dengan demikian masalah mursalah dapat disesuaikan dengan adanya pencantuman label halal yang ditandai dengan sertifikasi halal dengan alasan terciptanya kenyamanan dan kepastian halal pangan.



¹⁹Abdul Qadir Zaelani, *Metode Penemuan Hukum dan Implementasinya Pada Kasus-kasus Hukum Islam*, Bandar Lampung, Anugerah Utama Raharja (AURA), 2016, h. 56.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian data yang dikemukakan di atas maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Prosedur Pengajuan Sertifikasi Halal

Sertifikasi halal sejalan dengan UUD 1945 yang menjamin hak dan kewajiban sesama manusia. Implementasi tentang sertifikasi halal menjadi wajib dan dapat dipertanggungjawabkan dengan dibentuknya payung hukum yang disesuaikan dengan perubahan bahan pangan, obat-obatan dan kosmetika. Peraturan hukum tersebut antara lain ; Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Undang-undang 18 Tahun 2012 Tentang Pangan, Undang-undang No. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal dan Instruksi Presiden RI No. 2 Tahun 1991 Tentang Peningkatan pembinaan dan Pengawasan Produksi dan Peredaran Makanan Olahan. Sejalan dengan dibuatlah prosedur pengajuan sertifikasi halal sebagai berikut :

1) Memahami persyaratan sertifikasi halal dan mengikuti pelatihan SJH. 2) menerapkan sistem jaminan halal. 3) Menyiapkan dokumen sertifikasi halal. 4) Melakukan pendaftaran sertifikasi halal [upload data]. 5) melakukan Monitoring pre audit dan membayar akad sertifikasi. 6) pelaksanaan audit lapangan. 7) melakukan Monitoring pasca audit. 8) memperoleh sertifikat halal.

Pengajuan sertifikasi halal tahap pertama hingga keempat dapat dikatakan tidak ada suatu kendala. Tetapi ketika sudah memasuki tahap kelima sampai kedelapan dikhawatirkan resiko ketidakjujuran data pelaku usaha tersebut yang terjadi antara lain, ketika hendak melakukan pre audit yakni persiapan perusahaan untuk di uji kelayakannya, maka yang bertanggung jawab ialah audit internal itu sendiri yakni pimpinan kepada bawahan dan karyawan. Apabila pemimpinan tersebut mempunyai ketidak pedulian dan mengabaikan keselamatan, kesehatan dan kesejahteraan umat bisa saja pemimpin tersebut memalsukan laporan nya kepada LPPOM MUI Hal ini berpengaruh terhadap legalitas sertifikasi halal tersebut.

Selanjutnya, ketika melakukan audit lapangan yakni auditor halal eksternal dari pihak LPPOM MUI. Ketika melaksanakan audit lapangan, jadwal audit yang telah ditentukan oleh LPPOM MUI diberitahukan kepada pelaku usaha. Audit yang berjumlah 3 orang yang disaring dari relawan dan non relawan dengan pendidikan terakhir minimal S1(Strata Satu) dan SMA/ sederajat yaitu 2 orang audit lulusan minimal Strata 1 dan Strata 2 dalam bidang pangan, kimia, biokimia, teknik industri, biologi, atau farmasi, dan 1 orang dari pendidikan terakhir SMA/ sederajat dengan syarat untuk tesebut diatas memahami dan memiliki wawasan luas mengenai kehalalan produk menurut syariat Islam serta memperoleh sertifikat dari MUI.

Jadwal yang telah ditentukan dan pelaku usaha di informasikan tentang jadwal pelaksanaan audit. Pada hari ketika Pelaksaaan audit lapangan, pelaku usaha pada

hari yang dijadwalkan diminta kejujurannya dalam bahan agar auditor halal mengetahui yang bertujuan untuk kebaikan umat. Terakhir pelaksanaan Monitoring pasca audit dikerjakan oleh auditor internal itu sendiri yakni pemimpin perusahaan atau orang yang dipercaya perusahaan. Auditor internal terdiri dari muslim dan non muslim. Dalam pemeriksaan laboratorium dilakukan apabila bahan dicurigai oleh audit lapangan atau pengakuan dari pelaku usaha Setelah semua persyaratan auditor halal eksternal terpenuhi maka diterbitkanlah sertifikasi halal.

2. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Legalitas Sertifikasi Halal

Dalam mengimplementasikan sertifikasi halal LPPOM MUI dan Pemerintah telah bekerjasama membuat undang-undang bertujuan mententramkan umat yang mana undang-undang tersebut menjalankan dari hukum Al-Qur'adan Al-Hadist. Salah satunya UU No.33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal. Berdasarkan bunyi pasal 4 UU No.33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal “ Setiap Produk makanan dan minuman yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal.” Ketentuan tersebut menjadikan sertifikasi dan labelisasi halal sebuah kewajiban bagi para pelaku usaha.

Demikian juga secara fiqiyah, sertifikasi halal adalah sebuah aturan normatif yang dibuat, di usulkan dan disetujui oleh ulama dan pemerintah yang dalam hal ini dapat disebut sebagai ijma' yang mana ulama bersepakat bahwa sertifikasi dan labelisasi halal di bidang mu'amalah (jual beli) khususnya pangan yang sudah disertai dengan legalitas sertifikat halal yang nash sudah mengaturnya.

Dalam Al-Qur'an Surat An-Nisaa Ayat 58 tentang *ulil amri*, perkataan Menaati *Ulil Amri* adalah kewajiban. Perkataan *Amri* yang terdapat pada ayat tersebut berarti hal, keadaan atau urusan yang bersifat umum meliputi urusan dunia dan urusan agama. *Ulil Amri* dalam urusan dunia ialah raja, kepala negara, pemimpin atau penguasa, sedang *ulil amri* dalam urusan agama ialah para mujtahid

Dapat dipahami bahwa jika para *ulil amri* itu telah sepakat tentang sesuatu ketentuan atau hukum dari suatu peristiwa, maka kesepakatan itu hendaklah dilaksanakan dan dipatuhi oleh kaum muslimin, serta pelaku usaha.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas maka penulis dapat memberi saran sebagai berikut :

1. Terkait LPPOM MUI, mengingat banyaknya penggunaan bahan tambahan serta hasil rekayasa genetik dalam bahan baku produk makanan olahan keripik pisang, maka diperlukan diadakannya sosialisasi terhadap informasi bahan pangan yang boleh digunakan dan tidak boleh digunakan dalam industri pangan kepada masyarakat, supaya tidak terjadi penyalahgunaan bahan baku pangan yang haram atau berbahaya dalam proses produksi makan dan minuman. Peran pemerintah dan instansi setempat sangat dibutuhkan guna pengawasan beredarnya produk makanan olahan tanpa mendapatkan izin BPOM maupun sertifikasi halal LPPOM MUI yang kemungkinan berbahaya untuk dikonsumsi masyarakat, serta memberikan sanksi yang tegas kepada

pelaku usaha yang menyimpang dari prosedur yang telah ditetapkan dalam undang-undang maupun dalam peraturan yang lainnya. LPPOM MUI setiap 6 bulan sekali mengadakan cek terhadap pelaku usaha. Meskipun pemberitahuan berkala setiap 6 bulan sekali dilakukan oleh perusahaan atau pelaku usaha tak jarang terjadi ketidaksesuaian pelaporan dan lapangan serta penambahan untuk audit lapangan.

2. Terkait pelaku Usaha, memahami bahwa mencari keuntungan dalam Islam semata bukanlah hal yang dapat diterima Allah SWT, Pelaku usaha lebih memperhatikan makanan yang telah dibuatnya secara kehalalan dan *Tayyibah* (baik dan bergizi). Selain itu pada saat pelaksaannya audit lapangan, pelaku usaha diminta jujur dan tidak ada manipulasi dalam bentuk apapun. Konsumen khususnya konsumen muslim harus lebih teliti dan lebih kritis mengenai kehalalan produk-produk makanan dan minuman yang akan dikonsumsi, karena hal tersebut merupakan sebuah antisipasi untuk menghindari hal-hal yang dilarang atau diharamkan oleh agama. Selain itu diperlukan juga pengetahuan yang lebih mendalam bagi setiap muslim tentang hukum-hukum Islam yang berkaitan dengan halal dan haram.
3. Peran Pemerintah, peran pemerintah dan instansi setempat sangat dibutuhkan. Pengawasan serta pembinaan untuk peredaran makanan olahan lebih diperhatikan. Sesuai dengan instruksi Presiden RI No. 2 Tahun 1991 Tentang Peningkatan dan Pembinaan dan Pengawasan Produksi dan Peredaran Makanan Olahan. Pemerintah, LPPOM dan BPPOM sebagai wadah penjamin

kesehatan dan sertifikasi halal harus lebih cepat menyikapi hal-hal yang mendekati keharaman suatu produk bila diperlukan. Dalam menyikapi usaha kecil dan menengah yang kekurangan dana untuk mendapatkan sertifikasi halal pemerintah sebaiknya lebih meratakan subsidi bantuan tersebut. Pemberian pengawasan diperketat bagi produk impor maupun lokal yang untuk kedepannya akan menjadikan Indonesia negara yang menjamin kenyamanan, keamanan, serta kebaikan bersama



DAFTAR PUSTAKA

- Al-Asyhar, Thabieb *Bahaya Makanan Haram bagi Kesehatan Jasmani dan Kesucian Rohani*, (Jakarta: PT. Al-Mawardi Prima, 2002)
- A. Nasution, SH, *Konsumen dan hukum, Pustaka Sinar Harapan*, Jakarta, 1995.
- Abdul Aziz dahlan et al; *Ensiklopedi hukum Islam*
- Adib, Bisri dan munawwir AF; *kamus Indonesia Arab; pustaka progressif*; Surabaya; 1999.
- Ahmadi, Miru dan Sutarman, Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakrta, 2014.
- Al-Quran dan Terjemahannya, Semarang,CV. Toha Putra .
- Al-Quran dan Terjemahnya*, (Jakarta: Departemen Agama RI)
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2002).
- Ash-Shidqy, Hasbi, Muhammad, *Pengantar Hukum Islam, Bulan Bintang*. (Jakarta 1963.
- Bagian Proyek Sarana dan Prasarana Produk Halal Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, *Modul Pelatihan Auditor Internal Halal*, (Jakarta,2003)
- _____, *Panduan Sertifikasi Halal*, (Jakarta: Departemen Agama RI., 2003),
- _____, *Petunjuk teknis pedoman sistem produksi halal*, (Jakaarta, 2003)
- _____, *Tanya Jawab Seputar Poduki Halal*, (Jakarta, 2003.)
- Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahnya (Semarang: CV. Asy-Syifa', 2001)
- _____, *Pedoman Fatwa Produk Halal*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2003),
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Inonesia Pusat Bahasa* ,Edisi ke 4, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011)

- H.M.K. Bakri, *Hukum Pidana Dalam Islam*, Solo, Ramadhani,
- Hasan, Sofyan, *Sertifikasi Halal Dalam Hukum Positif Regulasi dan Implementasi di Indonesia*, Yogyakarta, 2014
- Hussein, Bahresy, *Pedoman Fiqh Islam*, Surabaya, Al-Ikhlas, 1981
- Ichwan, Sam, et. al., *Ijma' Ulama Keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia III Tahun 2009*, (Jakarta: Majelis Ulama Indonesia, Cet. ke-1, 2009)
- Khallaf, Wahhab Abdul, *Ilmu Ushul Fiqh*, Semarang, Dina Utama, 1994, cet.1, hl
- Kholil, Munawar, *Kembali Kepada Al- Qur'an dan As-Sunnah*, Semarang; Bulan Bintang, 1995.
- KN. Hasan, Sofyan, "Kepastian Hukum Sertifikasi dan Labelisasi Halal Produk Pangan" *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 14 No. 2 Mei 2014
- Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan kosmetika Majelis Ulama Indonesia, *Panduan Umum Sistem Jaminan Halal LP POM-MUI*, Jakarta.
- Hakim, Lukmanul, *Sertifikasi Halal MUI Sebagai Upaya Jaminan Produk Halal*, Cet. Ke-1, Majelis Ulama Indonesia, Jakarta, 2009.
- Majelis Ulama Indonesia Provinsi Lampung, *Kilas Balik 40 Tahun Majelis Ulama Indonesia Provinsi Lampung (Berkarya Untuk Umat)*, Lintas Kreasi, Bandar Lampung, 2014
- _____ (Berkarya Untuk Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa MUI Bidang POM dan IPTEK*, Mardani, *Hukum islam: Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2010,
- Maleong, Lexy, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2010),
- Muhadjir, Noeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta : Rakesarasin, 1996).
- Muhammad dan Alimin, *Etika dan Perlindungan Konsumen dalam Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi UGM*, Yogyakarta, 2004.
- Muhammad, Abdul Kadir, *Hukum dan penelitian*, (Bandung: PT.Citra Asitya Bhakti, 2004).

Proyek Perguruan Tinggi Agama /IAIN di Pusat Direktorat Pembinaan Perguruan Tinggi Agama Islam, Ilmu Fiqih, Jakarta 1982,

Qardhawi, Yusuf, *Halal Haram Dalam Islam*, Solo, Era Intermedia, 2003,

al-mahjub, Rifah , *Dirasat iqtisadiyat Islamiyah*, Ma'had ad-dirasat al-isalmiyah, Kairo.

Sujadi, Firman, *Lampung Sai Bumi Ruwa Jurai*, (Jakarta: Cita Insan Madani, 2012).

Struktur Organisasi MUI Provinsi Lampung Tahun 2016-2021.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung : Alfabeta, 2012).

Sukmadinata, Syaodih, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: PT.Remaja Rosdakarya, 2011).

Suryabrata, Sumadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1983).

Tiench, Tirta, winata, *Makanan Dalam Perspektif Al Qur'an Dan Ilmu Gizi*” Jakarta, Balai Penerbit FKUI, 2006.

Tim Penyusun, *Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*, Citra Umbaran, Bandung, 2007.

Widjaya Gunawan dan Yani,Ahmad *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2000), Cet. ke-3

Zaelani, Qadir, Abdul, *Metode Penemuan Hukum dan Implementasinya Pada Kasus-kasus Hukum Islam*, Bandar Lampung, Anugrah Utama Raharja (AURA), 2016.

Daftar Refrensi Lainnya

Asri, “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Produk Pangan Yang Tidak Bersertifikat Halal”, *Jurnal Kajian Hukum dan Keadilan (Matara,. Agustus 2016)*, vol IV No. 2.

Asep dan Mustolih “Argumentasi Hukum Jaminan Produk Halal”, *Jurnal Bimas Islam, (UIN Jakarta, 2015)*, Vol : II No.3

LPPOM-MUI (Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-Obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia, “tentang LPPOM-MUI”,
http://www.halalmui.org/mui14/index.pjp/main/go_to_section/2/31/page/1, Diakses tanggal 29 Oktober 2017.

Muhammad, Koliq, *Studi Analisis Terhadap Produk Makanan dan Minuman Olahan yang Belum Bersertifikat Halal (Studi Kasus pada IKM di Kota Semarang,)*, Skripsi Sarjana Fakultas Syrai’ah IAIN Walisongo, Semarang, 2010,

Tinjauan Pustaka: *Beberapa Teori Perlindungan Hak-Hak Konsumen dalam E-Commerce*, (<http://e-journal.uajy.ac.id/319/4/2MIH01712.pdf>, diakses 10 Juni 2017).

Undang-undang Jaminan Produk Halal No. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal.

Wawancara dengan Ibu Ir. Oti Nawansih, MP, Bidang Standarisasi dan Sistem Informasi Manajemen, Pada 24 November 2017, Pukul 13.30-14.30 WIB Di Teknologi Hasil Pertanian, UNILA.

Wawancara dengan Bp. Gunawan, Pelaku Usaha Keripik Pisang RIZKA, tanggal 01 Januari 2017.

Wawancara dengan Bp. Refliyanto S.Pd, Kepala Bidang Pelatihan, Tanggal 25 November 2017 pukul 10.00-11.00 WIB.

Wawancara dengan Ibu Ir. Susilawati, MS Bidang Pengkajian dan Penelitian, Pada 23 November 2017, Di Teknologi Hasil Penelitian Unila, pukul 15.00-16.00 WIB.

L

A

M

P

I

R

A

N





KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH

Alamat : Jl. Let. Kol. Hi. Endro Suratmin Sukarame I Telp.Fax. (0721) 703289 Bandar Lampung 35131

Nomor : B.954/UN.16/DS/PP.009/10/2017
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (Satu) Exemplar
Perihal : **Permohonan Izin Riset**

Bandar Lampung, 09 Oktober 2017

Kepada Yth.

Ketua Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetik Majelis Ulama Indonesia
Lampung (LP POM) Lampung
Kota Bandar Lampung

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Bersama ini dimohonkan kepada Ketua Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetik Majelis Ulama Indonesia Lampung (LP POM) Lampung Kota Bandar Lampung kiranya berkenan memberikan izin Penelitian kepada mahasiswa kami :

Nama / NPM : Ricky Prabowo / 1421030134
Semester / Jurusan : VII (tujuh) / Mu'amalah (MU)
Judul Penelitian : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Prosedur Pangajuan
Sertifikasi Halal Pada Produk Makanan Olahan Keripik Pisang
(Studi Pada Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan
Kosmetik Majelis Ulama Indonesia Lampung (LP POM)
Lampung)
Lokasi Penelitian : Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetik
Majelis Ulama Indonesia Lampung (LP POM) Lampung
Penanggung jawab : Dekan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung

Perlu kami sampaikan bahwa penelitian ini semata-mata untuk kepentingan ilmiah sebagai data dalam penulisan skripsi yang bersangkutan.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.





PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jalan Basuki Rahmat No.21 Telp. (0721) 481544 Fax. (0721) 481304

TELUK BETUNG

REKOMENDASI PENELITIAN /SURVEI

Nomor : 070/1648 /III/VII.01/2017

- Dasar :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.
 2. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung
 3. Surat Dekan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung Nomor: B 954/UN.16/DS/PP.009/10/2017 tanggal 09 Oktober 2017 tentang Permohonan Izin Riset

DENGAN INI DIBERIKAN REKOMENDASI KEPADA :

- Nama/NPM : **Ricky Prabowo / 1421030134**
- Pekerjaan : Mahasiswa Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung
- Alamat : Jl. Sultan Badarudin Gg. Dahlia No.30 TKT Bandar Lampung
- Lokasi : Lembaga Pengkajian Pangan Obat-Obatan dan Kosmetik MUI Provinsi Lampung
- Jangka Waktu : 13 Oktober s.d. 13 Januari 2017
- Peserta : -
- Penanggungjawab : Dekan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung
- Tujuan : Mengadakan Penelitian dalam rangka penyusunan skripsi.
- Judul Penelitian : **"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Prosedur Pengajuan Sertifikasi Halal pada Produk Makanan Olahan Keripik Pisang (Studi pada Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-Obatan dan Kosmetik Ulama Indonesia Lampung (LP POM))"**
- Catatan :
1. Rekomendasi ini diterbitkan untuk Kepentingan Penelitian.
 2. Tidak dibenarkan melakukan Penelitian/Survei yang tidak sesuai/tidak ada kaitannya dengan judul kegiatan Penelitian/Survei tersebut di atas.
 3. Melaporkan hasil Penelitian/Survei kepada Gubernur Lampung c.q. Kepala Badan Kesatuan bangsa dan Politik Provinsi Lampung
 4. Surat Rekomendasi ini di cabut kembali apabila Pemegangnya tidak mentaati Ketentuan tersebut di atas.



Dikeluarkan di Bandar Lampung
Pada tanggal 16 Oktober 2017

a.n. **GUBERNUR LAMPUNG**
KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA
DAN POLITIK

IRWAN SIHAR MARPAUNG
Pembina Utama Madya
NIP. 19620527 201410 1 001

Tembusan :

1. Kepala LP POM dan Kosmetik MUI Provinsi Lampung

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Bapak Refliyanto, M.Pd.I

Sebagai : Ketua Bidang Pelatihan

Menerangkan bahwa :

Nama : Ricky Prabowo

NPM : 1421030134

Fakultas/jurusan : Syari'ah/ Mu'amalah

Semester : VII (Delapan)

Benar telah mengadakan wawancara, guna keperluan penyusunan skripsi dengan judul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Prosedur Pengajuan Sertifikasi Halal Pada Produk Makanan Olahan Keripik Pisang (Studi Pada LPPOM MUI Provinsi Lampung)"

Demikianlah surat keterangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya, agar dapat diugunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Bandar Lampung 27, November, 2017



(.....)
Bp Refliyanto, M.Pd.I

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ibu Ir. Otik Nawansih, MP
Sebagai : Bidang Standart dan Sistem Informasi Manajemen

Menerangkan bahwa :

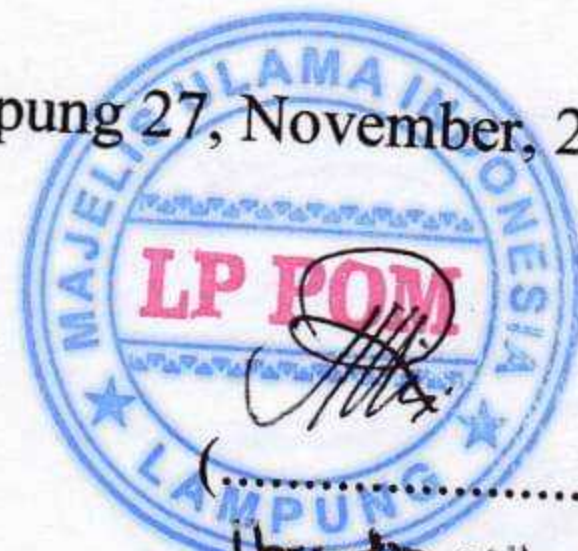
Nama : Ricky Prabowo
NPM : 1421030134
Fakultas/jurusan : Syari'ah/ Mu'amalah
Semester : VII (Delapan)

Benar telah mengadakan wawancara, guna keperluan penyusunan skripsi dengan judul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Prosedur Pengajuan Sertifikasi Halal Pada Produk Makanan Olahan Keripik Pisang"

Demikianlah surat keterangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya, agar dapat diugunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Bandar Lampung 27, November, 2017



(.....)
Ibu Ir. Otik Nawansih, MP

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ibu Ir. Susilawati, MS
Sebagai : Ketua Bidang Pengkajian Dan Penelitian

Menerangkan bahwa :

Nama : Ricky Prabowo
NPM : 1421030134
Fakultas/jurusan : Syari'ah/ Mu'amalah
Semester : VII (Delapan)

Benar telah mengadakan wawancara, guna keperluan penyusunan skripsi dengan judul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Prosedur Pengajuan Sertifikasi Halal Pada Produk Makanan Olahan Keripik Pisang"

Demikianlah surat keterangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya, agar dapat diugunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Bandar Lampung 27, November, 2017


(.....)
Ibu Ir. Susilawati, MS.

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Gunawan

Sebagai : pemilik usaha

Menerangkan bahwa :

Nama : Ricky Prabowo

NPM : 1421030134

Fakultas/jurusan : Syari'ah/ Mu'amalah

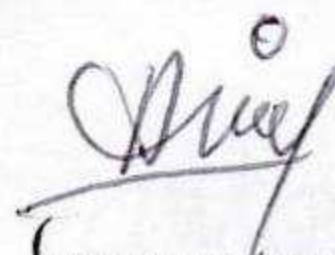
Semester : VII (Delapan)

Benar telah mengadakan wawancara, guna keperluan penyusunan skripsi dengan judul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Prosedur Pengajuan Sertifikasi ~~Halal Pada Produk Makanan~~ Olahan Keripik Pisang"

Demikianlah surat keterangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya, adar dapat diugunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Bandar Lampung 0,02,2017


(.....)

Bp. Gunawan

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Assalamu 'alaikum Wr. Wb

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Aan

Sebagai : Pegawai / Pekerja

Menerangkan bahwa :

Nama : Ricky Prabowo

NPM : 1421030134

Fakultas/jurusan : Syari'ah/ Mu'amalah


Semester : VII (Delapan)

Benar telah mengadakan wawancara, guna keperluan penyusunan skripsi dengan judul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Prosedur Pengajuan Sertifikasi Halal Pada Produk Makanan Olahan Keripik Pisang"

Demikianlah surat keterangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya, adar dapat diugunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb

Bandar Lampung 03.02.2017

()
Aan

Pertanyaan umum sebelum mewawancarai narasumber

1. Menurut Bapak/Ibu penting tidak setiap produk baik makanan, obat-obatan ataupun kosmetik memiliki legalitas sertifikasi halal dari LPPOM MUI ?
2. Bagaimana tanggapan Bapak/Ibu mengenai makanan yang sudah mempunyai legalitas halal MUI tetapi di temukan indikasi bahan yang haram dari produk tersebut ?

A. Bidang Standarisasi

1. Bagaimana gambaran umum bidang standarisasi ?
2. Bagaimana proses standarisasi untuk makakanan, obat-obatan maupun kosmetik ?
3. Kriteria apa saja yang harus di miliki sebuah produk untuk memenuhi bidang standarisasi LPPOM maupun MUI sendiri ?
4. Apa standar dari LPPOM MUI sendiri dalam mengkatagorikan produk halal ataupun haram ?
5. Bagaimana tanggapan Bapak/ibu mengenai makanan yang sudah mempunyai legalitas halal MUI tetapi diteukan indikasi bahan yang haram dari produk tersebut ?
6. Apa yang membedakan pemeriksaan pangan dan obat-obatan maupun kosmetika ?
7. Apakah cukup hanya menerima laporan 6 bulan sekali ?

B. Bidang Pelatihan

1. Untuk mengetahui bidang pelatihan ini sendiri, bagaimanakah gambaran umum bidang pelatihan ?
2. Apa tujuan dari LPPOM MUI sendiri menyelenggarakan pelatihan ?
3. Pencapaian apa yang di harapkan LPPOM MUI ketika sudah melakukan berbagai macam pelatihan ?

4. Lalu, dalam mengisi materi ataupun pelatihan narasumber dari manakah yang dipercaya LPPOM MUI untuk memberi pelatihan itu sendiri ?
5. Sasaran peserta yang ddi ambil untuk mengikuti pelatihan dari LPPOM MUI ini sebaiknya dari kalangan mana, dan apakah parra peserta di bebaskan biaya registrasi ?
6. Apakah pesera ketika melakukan pelatihan ini di beri pemahaman tentang prosedur pengajuan sertifikasi halal ?
7. Bagaimana prosedur pengajuan sertifikasi halal yang ditetapkan LPPOM MUI ?
8. Apakah makanan olahan seperti susu kedelai, keripik pisang atau singkong harus memiliki sertifikasi halal ?
9. Apa saja auditor halal terapkan untuk memenuhi kriteria pemeriksaan di lapangan serta apakah audit mendatangi pelaku usaha untuk cek 6 bulan sekali ?

C. Bidang Pengkajian dan Penelitian

1. Bagaimana gambaran umum bidang pengkajian dan penelitian ?
2. Bagaimana menurut Bapak/Ibutentang sertifikasi halal dalam makanan olahn keripik pisang ?
3. Apakah makanan olahan yang berasal dari tumbuhan perlu diteliti dan dikaji kembali ?
4. Apa yang menjadi indikasi makanan olahan tersebut tidak layak diberi sertifikasi halal ?
5. Apakah dalam bidang pengkajian dan penelitian berkerjasama dengan BADAN POM RI ?

Pertanyaan umum sebelum mewawancarai narasumber

1. Menurut Bapak/Ibu penting tidak setiap produk baik makanan, obat-obatan ataupun kosmetik memiliki legalitas sertifikasi halal dari LPPOM MUI ?
2. Bagaimana tanggapan Bapak/Ibu mengenai makanan yang sudah mempunyai legalitas halal MUI tetapi di temukan indikasi bahan yang haram dari produk tersebut ?

A. Bidang Standarisasi

1. Bagaimana gambaran umum bidang standarisasi ?
2. Bagaimana proses standarisasi untuk makakanan, obat-obatan maupun kosmetik ?
3. Kriteria apa saja yang harus di miliki sebuah produk untuk memenuhi bidang standarisasi LPPOM maupun MUI sendiri ?
4. Apa standar dari LPPOM MUI sendiri dalam mengkatagorikan produk halal ataupun haram ?
5. Bagaimana tanggapan Bapak/ibu mengenai makanan yang sudah mempunyai legalitas halal MUI tetapi diteukan indikasi bahan yang haram dari produk tersebut ?
6. Apa yang membedakan pemeriksaan pangan dan obat-obatan maupun kosmetika ?
7. Apakah cukup hanya menerima laporan 6 bulan sekali ?

B. Bidang Pelatihan

1. Untuk mengetahui bidang pelatihan ini sendiri, bagaimanakah gambaran umum bidang pelatihan ?
2. Apa tujuan dari LPPOM MUI sendiri menyelenggarakan pelatihan ?
3. Pencapaian apa yang di harapkan LPPOM MUI ketika sudah melakukan berbagai macam pelatihan ?

4. Lalu, dalam mengisi materi ataupun pelatihan narasumber dari manakah yang dipercaya LPPOM MUI untuk memberi pelatihan itu sendiri ?
5. Sasaran peserta yang ddi ambil untuk mengikuti pelatihan dari LPPOM MUI ini sebaiknya dari kalangan mana, dan apakah parra peserta di bebaskan biaya registrasi ?
6. Apakah pesera ketika melakukan pelatihan ini di beri pemahaman tentang prosedur pengajuan sertifikasi halal ?
7. Bagaimana prosedur pengajuan sertifikasi halal yang ditetapkan LPPOM MUI ?
8. Apakah makanan olahan seperti susu kedelai, keripik pisang atau singkong harus memiliki sertifikasi halal ?
9. Apa saja auditor halal terapkan untuk memenuhi kriteria pemeriksaan di lapangan serta apakah audit mendatangi pelaku usaha untuk cek 6 bulan sekali ?

C. Bidang Pengkajian dan Penelitian

1. Bagaimana gambaran umum bidang pengkajian dan penelitian ?
2. Bagaimana menurut Bapak/Ibutentang sertifikasi halal dalam makanan olahn keripik pisang ?
3. Apakah makanan olahan yang berasal dari tumbuhan perlu diteliti dan dikaji kembali ?
4. Apa yang menjadi indikasi makanan olahan tersebut tidak layak diberi sertifikasi halal ?
5. Apakah dalam bidang pengkajian dan penelitian berkerjasama dengan BADAN POM RI ?



Gambar 1. Keripik Pisang Tanpa Sertifikasi Halal



Gambar 2. Keripik Pisang Tanpa Sertifikasi Halal dan Merk



Gambar 3. Sertifikasi Halal Tidak dicantumkan No. Registrasi LPPOM hanya Dari DEPKES



Gambar 4. Sertifikasi Halal tidak mencantumkan No. Registrasi LPPOM dan dari BPOM



INDONESIA HALAL TRAINING & EDUCATION CENTER (IHATEC)

Gedung Global Halal Center, Jl. Pemuda No. 5 Kota Bogor 16161
☎ 0251-8358748 ext 1027 @ pelatihanhalal@halalmui.org

TERM OF REFERENCE (TOR) PELATIHAN 2018

NO	JUDUL PELATIHAN	JUMLAH HARI	BIAYA	SERTIFIKAT*	JADWAL PELATIHAN 2018											
					JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGS	SEP	OKT	NOV	DES
1	Pemahaman SJH	1	Rp 1.500.000	Kelulusan	24	26	-	25	-	5	-	-	3	-	26	-
2	Interpretasi dan Implementasi SJH	2	Rp 2.200.000	Kelulusan	9-10	6-7	6-7	10-11	22-23	-	3-4	14-15	18-19	16-17	13-14	11-12
3	Interpretasi dan Implementasi SJH di Restoran, Katering, Dapur	2	Rp 2.200.000	Kelulusan	-	-	20-21	-	-	-	-	-	4-5	-	-	-
4	Internal Audit SJH	2	Rp 2.500.000	Kelulusan		27-28	-	-	8-9		17-18			2-3	-	-
5	Penyusunan Dokumen SJH	1	Rp 1.400.000	Kehadiran	-	-	-	24	-	-	-	27	-	-	-	-
6	Pengetahuan Titik Kritis Bahan	1	Rp 1.400.000	Kehadiran	-	-	19	-	-	-	-	-	-	1	-	-
7	Implementasi Cerol	0.5	Rp 400.000	Tidak ada	8	5	5	9	21		2	13	17	15	12	10
8	HAS International — Bali	3	\$ 850	Kelulusan	-	-	-	18-20	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Pelatihan Inhouse	1-2	**	Kelulusan	SESUAI KESEPAKATAN IHATEC DAN PERUSAHAAN											

Keterangan:

*) Sertifikat kelulusan sebagai salahsatu **syarat** bagi perusahaan yang akan mendaftar proses sertifikasi halal MUI dan dapat menjadi syarat untuk mengikuti program sertifikasi kompetensi di LSP LPPOM MUI.

**) Biaya pelatihan inhouse sesuai dengan SK IHATEC berdasarkan jumlah hari, jumlah peserta, lokasi pelatihan dan bahasa pelatihan.

Deskripsi mengenai pelatihan lebih lengkap dapat dilihat pada halaman berikutnya.



INDONESIA HALAL TRAINING & EDUCATION CENTER (IHATEC)

Gedung Global Halal Center, Jl. Pemuda No. 5 Kota Bogor 16161
 ☎ 0251-8358748 ext 1027 @ pelatihanhalal@halalmui.org

DESKRIPSI PELATIHAN

No	Judul Pelatihan	Tujuan Pelatihan	Materi Pelatihan	Waktu	Target Peserta	Metode	Fasilitas Pelatihan
1	Pemahaman SJH	Memahami HAS 23000	a. Pengantar SJH b. Kebijakan dan Prosedur sertifikasi halal c. Kriteria SJH	1 hari (08.00-17.00)	Pihak yang membutuhkan pengetahuan atau <i>refreshment</i> SJH	Penyampaian konsep	Modul, makan siang, snack, akses Wifi, training kit, sertifikat
2	Interpretasi dan Implementasi SJH	a. Memahami HAS 23000 b. Mampu merencanakan dan menerapkan SJH c. Memahami persiapan sertifikasi halal d. Memahami penilaian SJH	a. Pengantar SJH b. Kebijakan & Prosedur sertifikasi halal c. Kriteria SJH d. Pengembangan dan Penerapan SJH e. Pengenalan Cerol	2 hari (08.00-17.00)	Pihak yang membutuhkan pengetahuan dan keterampilan terkait penerapan SJH serta persiapan sertifikasi halal	Penyampaian konsep, diskusi kelompok, latihan, studi kasus	Modul, makan siang dan snack, akses Wifi, training kit, sertifikat
3	Internal Audit SJH	a. Memahami HAS 23000 b. Mampu merencanakan dan menerapkan audit internal SJH c. Memahami penilaian SJH	a. Kebijakan & prosedur sertifikasi halal b. Kriteria SJH c. Prosedur Audit d. Teknik Audit e. Role Play Audit	2 hari (08.00-17.00)	Pihak yang membutuhkan pengetahuan dan keterampilan terkait penerapan audit internal SJH	Penyampaian konsep, diskusi kelompok, latihan, studi kasus	Modul, makan siang dan snack, akses Wifi, training kit, sertifikat
4	Penyusunan Dokumen SJH	a. Memahami jenis dokumen SJH b. Mampu menyusun dokumen SJH	a. Pengembangan SJH b. Menyusun Manual SJH c. Menyusun Prosedur SJH d. Menyusun form SJH	1 hari (08.00-17.00)	Pihak yang membutuhkan keterampilan terkait penyusunan dokumen SJH	Penyampaian konsep, latihan, studi kasus	Modul, makan siang dan snack, akses Wifi, training kit, sertifikat
5	Pengetahuan Titik Kritis Bahan	Memahami titik kritis bahan dan dokumen pendukung bahan	a. Kriteria SJH Bahan b. Titik Kritis Bahan (nabati, hewani, mikrobial, lain-lain) c. Dokumen Pendukung Bahan	1 hari (08.00-17.00)	Pihak yang membutuhkan pengetahuan terkait titik kritis bahan	Penyampaian konsep, latihan, studi kasus	Modul, makan siang dan snack, akses Wifi, training kit, sertifikat
6	Implementasi Cerol	Mampu menggunakan aplikasi CEROL-SS23000	CEROL SS-23000	0.5 hari (13.00-16.00)	Pihak yang membutuhkan keterampilan Cerol	Penyampaian konsep, latihan	Modul, snack, akses Wifi. Peserta membawa laptop.



INDONESIA HALAL TRAINING & EDUCATION CENTER (IHATEC)

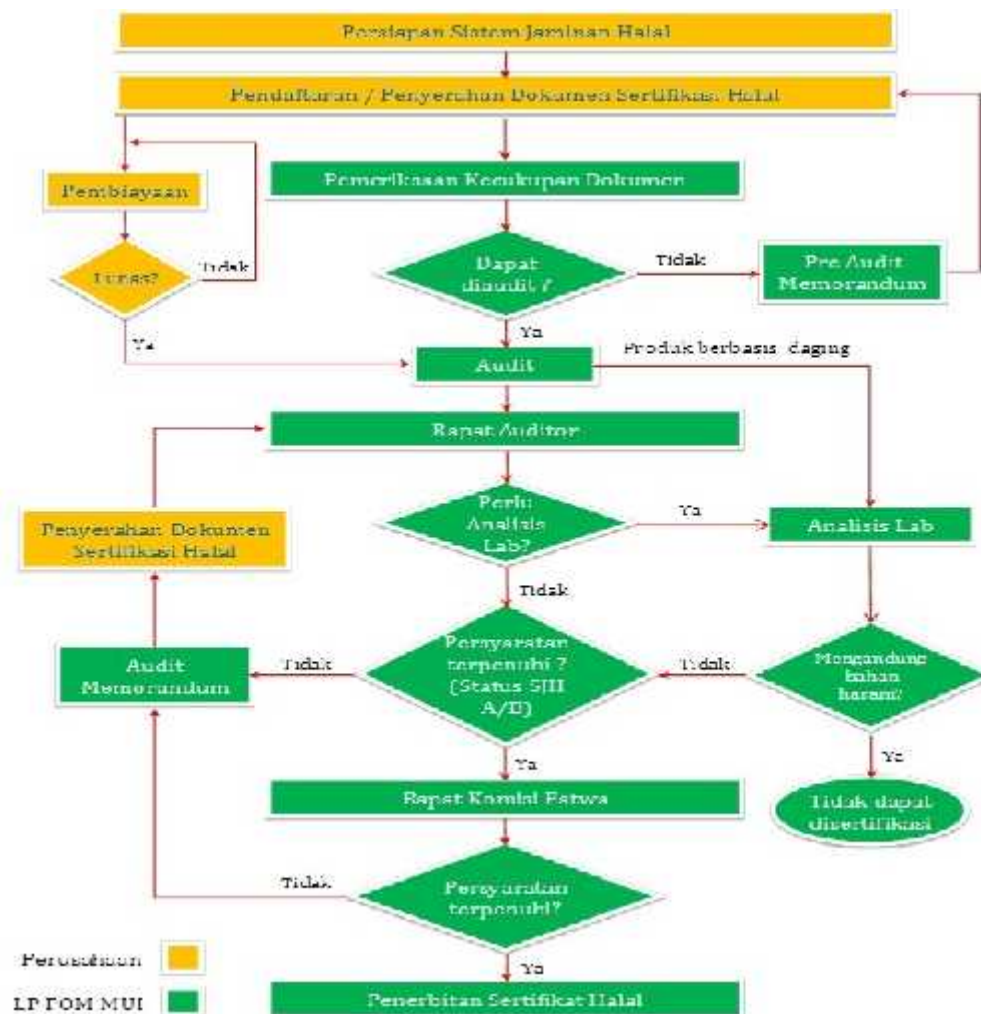
Gedung Global Halal Center, Jl. Pemuda No. 5 Kota Bogor 16161
☎ 0251-8358748 ext 1027 @ pelatihanhalal@halalmui.org

Catatan:

- TOR pelatihan 2018 dapat diunduh [disini](#) (link berisi TOR), form pendaftaran pelatihan reguler dapat diunduh [disini](#) (link berisi form pendaftaran pelatihan reguler), dan form pendaftaran pelatihan inhouse dapat diunduh [disini](#) (link berisi form pendaftaran inhouse)
- Tempat pelatihan diadakan di kota Bogor, kecuali pelatihan HAS International di bulan April akan diadakan di Nusa Dua, Bali
- Pendaftaran pelatihan dapat dilakukan melalui email pelatihanhalal@halalmui.org
- Pembayaran pelatihan dilakukan melalui transfer ke Bank BNI Syariah Cabang Bendungan Hilir - Jakarta, Nomor Rekening 0360 882 219 a/n YAYASAN HALAL INDONESIA
- Peserta yang sudah terdaftar pelatihan dan tempat pelatihan akan diinformasikan melalui email
- Peserta yang mengundurkan diri setelah melakukan pembayaran biaya **dapat menerima pengembalian** dengan ketentuan sebagai berikut:
 1. Jika pengunduran diri disampaikan maksimal 5 hari sebelum pelatihan dimulai, tidak akan dikenakan biaya administrasi
 2. Jika pengunduran diri disampaikan kurang dari 5 hari sebelum pelatihan dimulai, akan dikenakan biaya administrasi sebesar 50% dari biaya pelatihan
 3. Jika pengunduran diri disampaikan setelah program dimulai, tidak ada pengembalian biaya pelatihan
 4. Jika pengunduran diri disampaikan karena peserta menderita sakit atau mendapat tugas kantor, maka biaya akan dikembalikan secara proporsional dengan terlebih dahulu membuat surat permohonan yang melampirkan surat penugasan/surat keterangan sakit dari institusi yang berwenang
 5. Peserta wajib mengisi formulir permohonan pengembalian biaya pelatihan yang sudah disediakan dan pengembalian hanya dapat dilakukan melalui transfer antar bank dengan biaya pengiriman ditanggung pemohon
 6. Peserta yang tidak ingin mengundurkan diri dapat mengajukan permohonan penundaan keikutsertaan pelatihan
- Informasi lebih lanjut dapat menghubungi: **Ibu Dinda (0811 114 5060) / Bapak Dwi (0251-8358748 ext 1027)**

PROGRAM BUNDLING DENGAN SERTIFIKASI PERSONAL

- Khusus pelatihan SJH dengan jenis sertifikat kelulusan, terdapat **program bundling dengan sertifikasi personal**.
- Peserta pelatihan SJH **yang beragama Islam** dapat mengikuti program sertifikasi kompetensi setelah pelatihan selesai. Ketentuan dan persyaratan sertifikasi kompetensi dapat dilihat di www.lspahalalmui.com
- Dengan mengikuti program bundling, maka peserta **mendapatkan potongan harga sebesar 25%** untuk biaya uji kompetensi dan biaya pelatihan SJH.





KEMENTRIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM







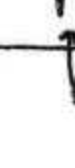


JL. LET. KOL HENDRO SURATMIN. SUKARAME I BANDAR LAMPUNG, Telp. (0721) 703260

KARTU KONSULTASI

Nama : RICKY PRABOWO

Npm : 1421030134

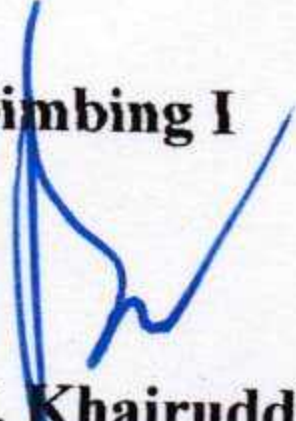
Judul Skripsi : **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PROSEDUR
PENGAJUAN SERTIFIKASI HALAL PADA PRODUK
MAKANAN OLAHAN KERIPIK PISANG (Studi pada LPPOM
MUI Provinsi Lampung)”**

No	Tanggal Konsultasi	Konsultasi	Paraf pembimbing	
			I	II
1	03/07/2017	Pengajuan proposal kepada Pembimbing II		
2	05/07/2017	Perbaikan proposal kepada Pembimbing II		
3	10/07/2017	Acc proposal oleh Pembimbing II		
4	17/07/2017	Pengajuan proposal kepada Pembimbing I dan revisi judul		
5	21/07/2017	Acc proposal oleh pembimbing I		
6	07/02/2018	Pengajuan Bab I-V kepada Pembimbing II		
7	12/02/2018	Perbaikan sub Bab, dan penulisan ke Pembimbing II		
8	15/02/2018	Acc Bab I-V oleh pembimbing II		
9	01/03/2018	Pengajuan Bab I-V kepada pembimbing I		
10	06/03/2018	Perbaikan abstrak, penulisan Bab I-V dan penyesuaian kalimat di kesimpulan kepada pembimbing I		

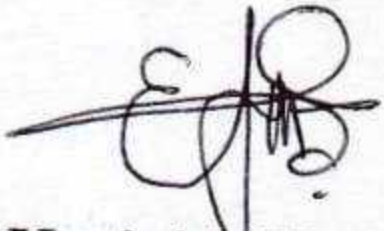
11	12/03/2018	Perbaikan penulisan footnote Bab I-V dan penulisan bab 1 kepada Pembimbing I		
12	16/03/2018	Acc Bab I-V oleh Pembimbing I		

Bandar Lampung, 16- 03- 2017

Pembimbing I


Dr. H. Khairuddin, M.H.
NIP :196210221993031002

Pembimbing II


Eti Karini, S.H., M.Hum.
196300121993032002